

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
BADAN USAHA MILIK DESA DEWANDARU DI DESA
TEGALWERU KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dengan
Peminatan Inovasi Pemerintahan**

Oleh:

Irma Listia Ningrum

165120607111013



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SAMPAH BADAN USAHA MILIK DESA *DEWANDARU*
DI DESA TEGALWERU KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Oleh:

IRMA LISTIA

NINGRUM

NIM.

165120607111013

Telah disetujui oleh Dosen

Pembimbing



Dr. Dra. Alifiulahtin

Utaminingsih, M.Si NIK.

2012096704091002

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BADAN USAHA MILIK DESA DEWANDARU DI DESA TEGALWERU KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Oleh:

IRMA LISTIA NINGRUM

NIM. 165120607111013

Telah diuji dan dinyatakan Lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan pada

Jumat, 18 Juni 2021

Tim Penguji :

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

M.Barqah Prantama, S.AP., M.AP

Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA

NIK. 2018078707281001

NIK. 2016078805142001

Pembimbing Utama

Dr.Dra.Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si

NIK. 2012096704091002

Mengetahui,

Ketua Jurusan PPHI

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt

NIP. 197802202010121001

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Irma Listia Ningrum

NIM : 165120607111013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul **IMPLEMENTASI**

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BADAN USAHA MILIK DESA

DEWANDARU DI DESA TEGALWERU KECAMATAN DAU KABUPATEN

MALANG adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Blitar, 19 Juli 2021
Yang membuat pernyataan


Irma Listia Ningrum
165120607111013

ABSTRAK

Irma Listia Ningrum, 2021, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Badan Usaha Milik Desa Dewandaru di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Dr.Dra.Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si

Pada tahun 2019 Pemerintah Desa Tegalweru Kecamatan DAU Kabupaten Malang merealisasikan pendirian BUMDes dengan unit usahanya yaitu pengelolaan air dan sampah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C, Edward III. Teori ini memiliki empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, dan dokumentasi serta observasi lapangan. Hasil penelitian implementasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik Desa Dewandaru di Desa Tegalweru Kecamatan DAU Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah belum optimal. Komunikasi dengan masyarakat masih kurang, sosialisasi yang tidak merata menyebabkan banyak ketidaktahuan masyarakat tentang BUMDes. Fasilitas yang belum memadai diantaranya jumlah alat pengangkut sampah yang minim, serta sumber daya manusia yang kurang mendukung juga menjadi salah satu penyebab BUMDes ini belum bisa berkembang. Keterbatasan modal juga mengakibatkan tidak adanya insentif atau gaji yang diberikan kepada staf pengelola BUMDes sehingga mereka bekerja secara sukarela. Struktur birokrasi terbentuk dengan baik dan jelas, SOP juga sudah dibuat dan dapat dipahami dengan jelas oleh staf sehingga membantu proses pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

Kata kunci: BUMDes Tegalweru, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

Irma ListiaNingrum, 2021, *The Implementation of Waste Management Policy of Village-Owned Enterprises Dewandaru in Tegalweru Village, Dau District, Malang Regency.* Major Governance Science, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Brawijaya, Dr.Dra.AlifiulahtinUtaminingsih, M.Si

In 2019, Government of Tegalweru DAU District had released *BUMDes* establishment with its business unit called water and waste management. The research design used was qualitative research by applying the theory of management policy by George C. Edward III. This theory has four indicators, namely communication, resource, disposition and the structure of bureaucracy. The data collection involved three techniques, namely having an interview session, documentation, and observation. The result of this study described that the management policy of village-owned enterprises Dewandaru Village in Tegalweru Village DAU District Malang Regency in the form of waste management has not been optimized yet. The communication with the citizens was less and an incomplete socialization made the people around the village did not know what *BUMDes*. Furthermore, the incomplete facilities found were that the minimum number of long crew cabs and the incompetent human resources and development were the reasons why *BUMDes* had not been well-developed yet. The limitedness of the capital also created new problems; it had no incentive or salary for the *BUMDes* staff associations so that they did it as a voluntary. Yet, the structure of bureaucracy was in well-structured and clearly-stated and SOP was designed and understandable so that the staff could help and do the tasks well in the process of *BUMDes* management.

Keywords: *BUMDes Tegalweru*, Policy Implementation, Waste Management.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ Implementasi Kebijakan Pengelolaan BUMDes *Dewardaru* di Desa Tegalweru, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang” yang merupakan salah satu tahapan yang ditempuh untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Atas terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis tercinta Bapak Imam Roji, Ibu Elis Sulistiana yang selalu senantiasa memberikan dukungan penuh serta doa yang tiada henti-hentinya.
2. Sanak saudara yang telah ikut memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
3. Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
4. Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si selaku dosen pembimbing.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam memberikan masukan dukungan.

6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat, dukungan,serta motivasi dalam proses mengerjakan skripsi ini.

7. Teman-teman LSO yang sudah memberikan semangat dan motivasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya yang tidakdapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir inimasih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan.Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Malang, 20 Apr2021

Penulis,

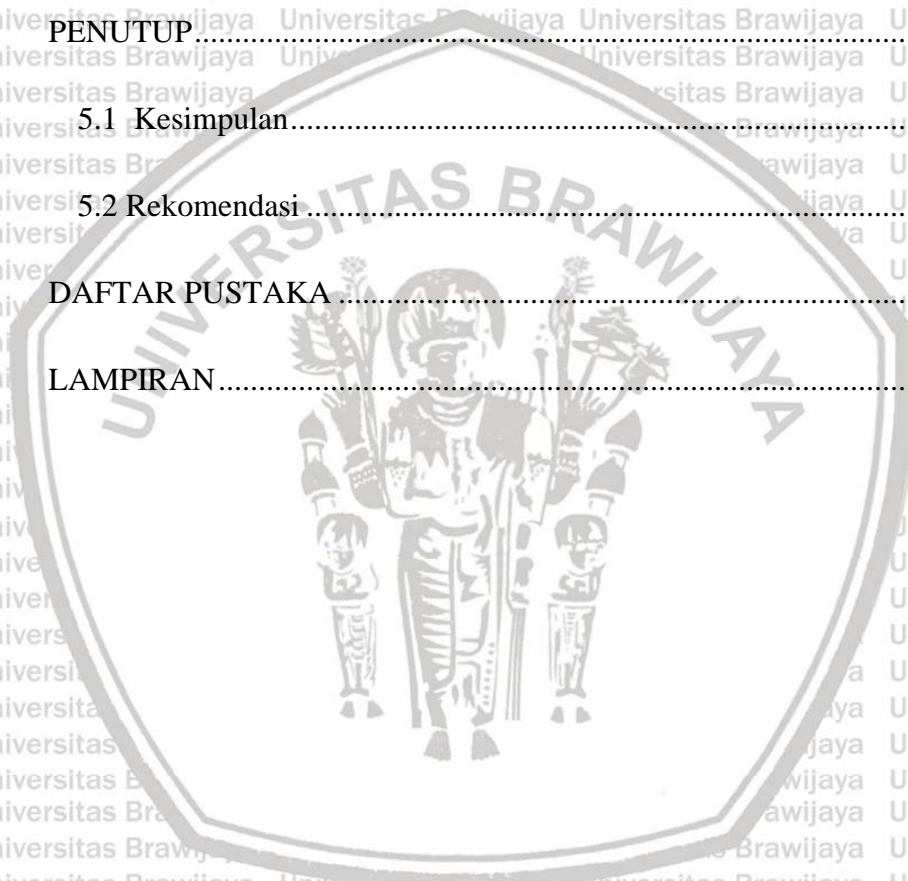
Irma Listia Ningrum
165120607111013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II	12

TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Literature Review	12
2.2 Kerangka Teoritik	30
2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik	30
2.2.3 Badan Usaha Milik Desa	35
2.3 Kerangka Pikir	37
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Fokus Penelitian	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	43
BAB IV	45
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BADAN USAHA	
MILIK DESA DEWANDARU DI DESA TEGALWEU, KECAMATAN DAU,	
KABUPATEN MALANG	45
4.1 KOMUNIKASI	48
4.2 SUMBER DAYA	51

4.3 DISPOSISI	58
4.4 STRUKTUR BIROKRASI	60
BAB V	63
PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Rekomendasi	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Pikir

37



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Kategori Status Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Malang	6
--	---





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data Jumlah Bumdes di Indonesia Tahun 2015-2019 3

Grafik 2. Jumlah BUMDes di Kabupaten Malang 4



DAFTAR TABEL

Table 1. Literature Review	20
Table 2. Informan Penelitian.....	41
Table 3. Latar Belakang Pendidikan Pengurus BUMDes Dewandaru Desa Tegalweru.....	52
Table 4. Sarana dan Prasarana BUMDes Unit Pengelolaan Sampah.....	55
Table 5. Modal Awal BUMDes	57



DAFTAR ISTILAH

Bottom-Up

: Merupakan pendekatan dimana pengambilan keputusan bersumber dari aspirasi dan masukan rakyat untuk kemudian di realisasikan atau diwujudkan oleh pemerintah.

BUMDES

:BUMDES yakni Badan Usaha Milik Desa.

BUMDES merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola oleh pemerintah desa beserta masyarakat yang berbadan hukum.

Disposisi

:Merupakan suatu sikap ataupun kemauan serta kecenderungan pelaku kebijakan dalam menjalankan kebijakannya.

Kredibel

:Merupakan sebuah cara pandang yang telah dimiliki oleh seseorang yang dapat dipercaya.

RPJMN

:RPJMN yaitu kependekan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. RPJMN

merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Pembangunan dimana disusun untuk jangka waktu 5 tahun.

SOP : SOP yaitu *Standart Operating Procedure*.

SOP ini merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk mengatur cara kerja sebuah organisasi.

Top-Down : Merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dari atas ke bawah. Dimana dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat.

TOSSA : Merupakan motor roda tiga yang digunakan untuk mengangkut barang.

TPA : Tempat Pembuangan Akhir sampah merupakan tempat untuk menimbun sampah dan menerima residu yang telah diproses sebelumnya.

TPST

:Tempat Pengolahan Sampah Terpadu merupakan tempat dilakukannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

UED-SP

:UED-SP yakni Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam. UED-SP merupakan sebuah lembaga dimana bergerak dalam bidang simpan pinjam.

Variabel

: Merupakan suatu besaran dimana nantinya dapat mempengaruhi hasil dari sebuah penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

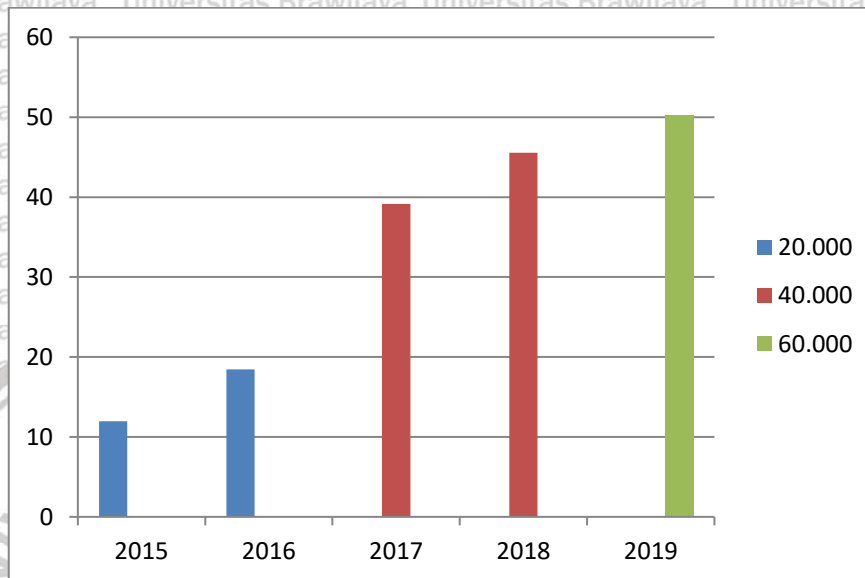
1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu hal yang penting dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Salah satu yang menjadi misi pemerintah saat ini yakni pembangunan yang juga pada ranah pingiran yang termasuk desa. Hal ini lebih didukung dengan adanya RPJMN pada tahun 2015-2019 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana penerapan desentralisasi melalui Sembilan program prioritas dengan salah satunya memperkuat pembangunan pada daerah-daerah dan desa. Prioritas pembangunan ini mewujudkan pembangunan dari tataran paling bawah yakni pemerintah desa.

Pembangunan pedesaan ini dilakukan dengan lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa agar lebih produktif, selain itu juga dengan fokus pada mengelola potensi yang dimiliki oleh desa tersebut demi meningkatkan perekonomian bagi desa. Dengan gencarnya dilakukan pembangunan di tingkat pedesaan, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pula pada perekonomian nasional dan akan terwujud kesejahteraan masyarakat secara luas. Pembangunan desa ini didukung dengan adanya Undang-undang tentang desa No.6 Tahun 2014.

Dengan disahkannya Undang-undang No.6 Tahun 2014 maka memberikan suatu harapan baru bagi pemerintah desa juga bagi masyarakat. Undang-undang ini bertujuan untuk menjadikan pemerintah desa untuk lebih mandiri. Kemandirian yang diharapkan ini tidak hanya pada sektor pemerintahannya saja, melainkan juga pada sektor pengelolaan masyarakat maupun potensi yang berada di suatu desa tersebut. Kemandirian ini sendiri merupakan proses dimana pemerintah desa melakukan sebuah kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Kegiatan ini sendiri dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan mereka sendiri. Melalui Undang-undang ini pula, diharapkan pelaksanaan pembangunan di desa dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat desa itu sendiri. Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pembentukan Undang-undang ini memiliki kesan yang kuat bagi pemerintah untuk menjadikan lembaga di pemerintah desa lebih maju untuk kedepannya

Pembangunan di pedesaan ini menjadikan pemerintah mengatur adanya pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes ini sebenarnya bukan lagi hal baru pada pemerintah desa. BUMDes ini menjadi badan usaha yang dimiliki desa dimana menjadi salah satu sarana untuk menjalankan kemandirian bagi desa. Seperti yang sudah diketahui bahwa jumlah berdirinya BUMDes ini semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut data yang ada bahwa dari tahun 2015 hingga 2019 terdapat peningkatan yang cukup tajam.

Grafik 1 Data Jumlah Bumdes di Indonesia Tahun 2015-2019

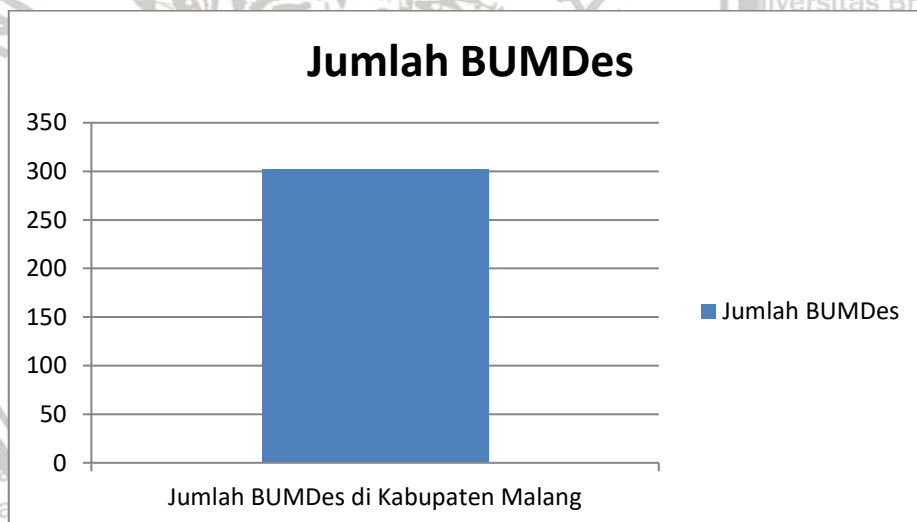
Hasil Olahan Penulis

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sendiri terdapat sekitar 11.945 bumdes, kemudian tahun 2016 terdapat 18.446 bumdes berdiri, kemudian pada tahun 2017 ada sekitar 39.149 bumdes, selanjutnya tahun 2018 terdapat 45.549 jumlah bumdes yang telah berdiri dan terakhir pada tahun 2019 sendiri terdapat sekitar 50.199 bumdes di Indonesia.

Keberadaan BUMDes ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini pun dibentuk sesuai dengan potensi yang ada dan dimiliki oleh desa.BUMDes ini pun dapat berbeda dan beragam di setiap desanya.Permendes tersebut juga mengatur secara jelas tentang pengelolaan

BUMDes dan disertai dengan tugas beserta fungsi masing-masing perangkatnya. BUMDes ini dibentuk dengan mengedepankan peran pemerintah desa serta masyarakat secara lebih efektif. Dengan begitu sangatlah dibutuhkan langkah yang strategis guna mengelolanya dengan tepat. Disamping itu diperlukan perhatian terhadap potensi lokal serta dukungan kebijakan pemerintah di atasnya untuk mengantisipasi surplus kegiatan ekonomi desa dengan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi wilayah pedesaan.¹

Grafik 2. Jumlah BUMDes di Kabupaten Malang



Hasil Olahan peneliti

Dari data di atas seperti yang sudah dijelaskan bahwa terdapat sebanyak kurang lebih 302 Badan Usaha Milik Desa yang telah dibentuk hingga tahun 2021 hanya di Kabupaten Malang. Hampir dari semua desa yang ada di Kabupaten Malang sudah memiliki BUMDes dari berbagai kategori statusnya.

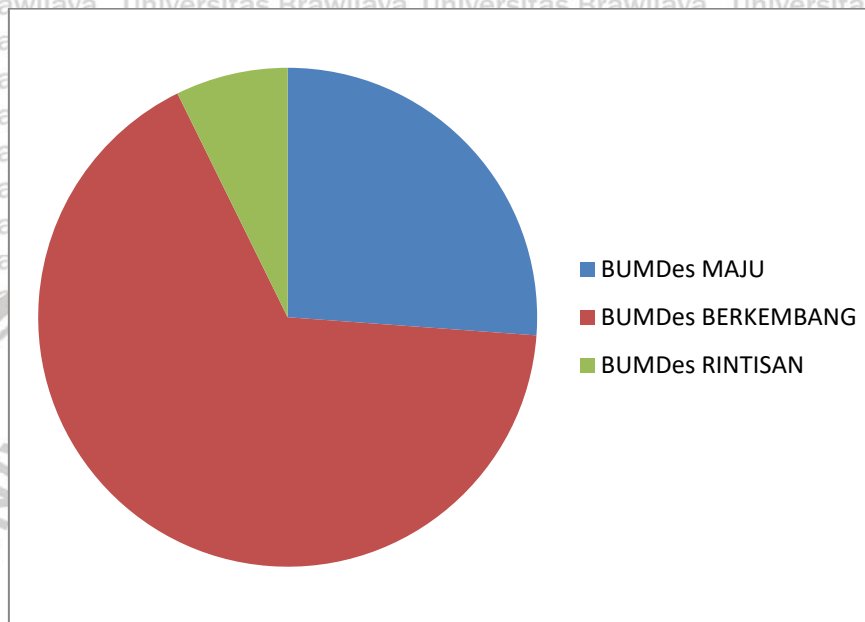
¹Mulia, I.S, Skripsi: " IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)" (Jakarta : Universitas Terbuka, 2017), 4.

BUMDes yang dibentuk pun juga beragam jenis usaha sesuai dengan apa potensi yang dimiliki desa masing-masing.

Di Kabupaten Malang menjadi salah satu kabupaten yang juga tengah gencar mengupayakan terbentuknya BUMDes. Pembentukan BUMDes ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Kabupaten Malang memiliki jumlah desa sebanyak 328 dan sudah terbentuk sebanyak 302 BUMDes hingga tahun 2020². Kemudian dari total 302 BUMDes yang ada di Kabupaten Malang, sebanyak 79 BUMDes masuk pada kategori maju, 201 kategori BUMDes berkembang dan kemudian 22 BUMDes masuk kategori rintisan atau baru berdiri.³

² HUMAS. (2020, November 27). *Diterima Pjs. Bupati Malang, Mendes PDTT Sosialisasikan Permendesa PDTT*. Retrieved Mei 09, 2021, from Forum Malang.go.id: <http://forum.malangkab.go.id/mlg/default/page?title=malangkab-pusat-opd-diterima-pjs-bupati-malang-mendes-pdtt-sosialisasikan-permendesa-pdtt>

³ 1, M. E. (2020, November 12). *Kabupaten Malang Raih Juara Umum BUMDes Award 2020*. Retrieved Mei 09, 2021, from Momentum.com: <https://memontum.com/127428-kabupaten-malang-raih-juara-umum-bumdes-award-2020>

Diagram 1. Kategori Status Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Malang

Keberadaan BUMDes di Kabupaten Malang yang masuk pada kategori baru berkembang dan kategori rintisan. Kecamatan DAU menjadi salah satu kecamatan dengan kategori rintisan dilihat dari jumlah BUMDes yang telah berdiri. Desa-desa di Kecamatan DAU sebagian sudah mulai sadar bahwa keberadaan BUMDes cukup dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kecamatan DAU sendiri terdiri dari sepuluh desa dimana sudah terbentuk sebanyak empat desa yang sudah memiliki BUMDes. BUMDes tersebut berada di desa Selorejo, desa Landungsari, desa Tegalweru dan desa Sumbersekar. BUMDes di Selorejo mengelola pertanian jeruk dan desa wisata jeruk, desa Landungsari memiliki BUMDes dengan mengelola usaha simpan

pinjam, kemudian desa Sumbersekar mengelola usaha sumbersekar mart, selanjutnya desa Tegalweru sendiri mengelola usaha pengelolaan sampah.

Keberadaan BUMDes yang didukung dengan adanya Perda tersebut diharapkan dapat menjadi bahan acuan sehingga pemerintah desa mampu memahami tentang pebentukan badan untuk mengelola potensi suatu desa sehingga dapat dijadikan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat desa tersebut. Selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai perwujudan dalam skala pembangunan nasional. BUMDes sendiri tidak selalu menekankan pada peningkatan atau pembentukan kegiatan yang berfokus pada perekonomian saja. Usaha yang dibentuk oleh desa tersebut bisa saja timbul ketika terdapat permasalahan di desa. Tujuan dari BUMDes ini sendiri juga dapat berupaya dalam mensejahterakan masyarakat desa sehingga terdapat sebuah kegiatan yang dapat masyarakat ambil dan nantinya akan berdampak baik bagi berjalanya kehidupan mereka sendiri. Salah satu desa yang berada di Kabupaten Malang yang mulai membentuk BUMDes yakni Desa Tegalweru. Desa Tegalweru merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Malang yang tergolong masih sangat baru dalam pendirian BUMDes. Desa Tegalweru ini sendiri memiliki potensi di bidang alam seperti halnya kebun buah jeruk. Masyarakat di Desa Tegalweru kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani.

Desa Tegalweru memiliki luas tanah sekitar 3,54 km persegi yang terbagi atas 5 RW dan 23 RT. Tingkat populasi penduduk di Desa Tegalweru mencapai 1.082 Kepala Keluarga. Dengan jumlah tersebut, sampah yang dihasilkan kurang lebih sebanyak 2 ton setiap harinya dengan rata-rata jumlah sampah per rumah tangga sebanyak 1,5 sampai 2 kg. Namun, banyaknya jumlah sampah di Desa Tegalweru tidak ditunjang dengan adanya pengelolaan sampah yang memadai baik dari segi ketersediaan lahan yang cukup ataupun fasilitas pengelolaan sampah yang tepat. Luas lahan TPA Desa Tegalweru hanya berkisar kurang lebih 850 m². Berbeda dengan Desa MulyoAgung yang memiliki tingkat populasi penduduk lebih banyak dari Desa Tegalweru yaitu sebanyak 4.222 Kepala Keluarga. Sampah yang dihasilkan desa tersebut kurang lebih sebanyak 6 ton setiap harinya, tetapi telah ditunjang dengan adanya pengelolaan sampah yang memadai. Luas lahan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Desa MulyoAgung mencapai 3000 m² dengan fasilitas pengelolaan sampah yang sudah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dengan demikian, jika dibandingkan dengan permasalahan sampah desa lain di Kecamatan DAU seperti Desa MulyoAgung, permasalahan sampah di Desa Tegalweru tergolong memerlukan perhatian khusus dengan pengelolaan sampah yang masih jauh tertinggal. Sehingga Desa Tegalweru berusaha menangani masalah sampah dengan mendirikan BUMDes unit pengelolaan sampah.

BUMDes di Desa Tegalweru ini baru saja terbentuk pada 17 Desember 2019 yang diberi nama “DEWANDARU” sesuai SK Kepala Desa Tegalweru

No.188.45/053/KEP/35.07.22.2006/2019. BUMDes ini menaungi unit usaha pengelolaan sampah. Tujuan dibentuknya BUMDes di Desa Tegalweru ini sendiri awalnya yakni untuk mengurangi permasalahan sampah yang ada di desa tersebut. Desa Tegalweru memiliki permasalahan sampah yang cukup mengganggu. Dengan banyaknya sampah tersebut tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang tepat untuk mengurangi jumlah sampah yang ada. Kesadaran masyarakat Desa Tegalweru yang kurang dalam membuang sampah menjadikan sampah sulit untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Bahkan ketika terjadi hujan yang cukup deras sampah ini akan naik ke jalan dan mengganggu pengguna jalan, bahkan mengakibatkan banjir. Keresahan warga ini sudah lama terjadi, akan tetapi memang belum dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi.

Oleh karena itu, dengan permasalahan sampah tersebut kemudian pemerintah desa mengupayakan membentuk BUMDes dengan unit usaha pengelolaan sampah. Namun demikian pengelolaan sampah melalui BUMDes tersebut belum optimal menjadikan BUMDes ini sulit untuk berkembang. Sumber daya manusia yang belum cukup mumpuni menjadi salah satu faktor pula ketidakoptimalan BUMDes. Alasan peneliti memilih BUMDes di Desa Tegalweru ini dikarenakan fokus pembentukan BUMDes ini yakni mewujudkan kesejahteraan sosial dan lingkungan masyarakat desa. Kesejahteraan disini dimaksudkan bahwa Pemerintah Desa melihat bahwa sampah menjadi salah satu permasalahan. Sehingga timbul pemikiran bahwa ketika permasalahan

lingkungan ini dapat teratasi, maka kesejahteraan warga kedepannya akan terwujud. Selain itu BUMDes di Desa Tegalweru merupakan BUMDes yang baru berdiri berbeda dengan beberapa penelitian yang membahas mengenai implementasi pengelolaan BUMDes yang memang pelaksanaannya sudah baik dan fokus pendirian lebih pada peningkatan perekonomian warga dan desa.

Berdasarkan fenomena di atas maka dapat menjadi perhatian untuk diteliti dan dapat menemukan informasi tentang upaya pengelolaan BUMDes. Dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan salah satu upaya bagi pemerintah menggali segala potensi desa demi terwujudnya kesejahteraan desa. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah BUMDes DEWANDARU di Desa Tegalweru, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang”.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah BUMDes “DEWANDARU” di Desa Tegalweru Kecamatan DAU Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah BUMDes “DEWANDARU” di Desa Tegalweru Kecamatan DAU Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran

Mengenai Implementasi Kebijakan BUMDes di Desa Tegalweru.

2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi selanjutnya peneliti terkait

Implementasi kebijakan BUMDes.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Tegalweru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan BUMDes telah berjalan.

2. Bagi masyarakat diharapkan dapat membangun kesadaran dan peduli dalam ikut serta mengelola potensi desa dengan adanya BUMDes agar terus berkembang dan maju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Pertama, Jurnal yang berjudul “ Analisis Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Roti Gulancir di Desa Sukabares Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Provinsi Banten”. Penelitian ini ditulis oleh Rahmawati dan Maulana Yusuf dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini menjelaskan bahwasannya BUMDes yang disebutkan belum dapat berjalan, dikarenakan dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Potensi yang dimiliki untuk dijadikan BUMDes sebenarnya sangat menjanjikan, akan tetapi terdapat hambatan lain seperti masyarakat yang tertutup sehingga membuat BUMDes ini belum dapat berjalan. BUMDes ini sendiri rencananya akan dimulai pada tahun 2021 ketika semua komponen telah terpenuhi. Perbedaan penelitian ini yakni BUMDes di Desa Sukabares ini belum terlaksana dan masih menjadi perencanaan.⁴

Kedua, Jurnal berjudul “ Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud”. Penelitian ini

⁴ Rahmawati, M. Y. (2018). Analisis Pengembangan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Roti Gulancir di Desa Sukabares Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik* , 121-134

dilakukan oleh Yulastri Mailantang, Alden Laloma dan Helly F.Kolondam pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori manajemen dari M.Suparmoko.

Terdapat empat indikator yang digunakan dalam menganalisis implementasi pengelolaan BUMDes ini diantaranya Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal dibuktikan dengan sebagian masyarakat belum merasakan keberadaan BUMDes, kemudian jumlah dari anggota pengurus bumdes belum mencukupi , kurangnya kesadaran masyarakat ikut berpartisipasi serta dalam proses pengawasannya tidak dilakukan secara optimal. Perbedaan penelitian yang dilakukan oeh peneliti sebelumnya yakni pada teori yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian yakni menggunakan teori manajemen menurut M.Suparmoko.⁵

Ketiga, Jurnal berjudul “ Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kewangkoan. Penelitian ini dilakukan oleh Happy Liow, Florence D,J, Lengkong, dan Novie Palar pada tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward

III. Penelitian ini menunjukkan bahwa implemnetasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Desa Tondegesan sudah terlaksana dengan baik. BUMDes tersebut mengelola dua unit usaha diantaranya pemenuhan air bersih dan program peternakan. Indikator-

⁵ Yulastri Mailantang, A. L. (2019). Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik* , 1-12.

indikator yang digunakan untuk menganalisis implemetasi pengelolaan BUMDes ini sudah terlaksana dengan baik. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yakni terdapat pada jenis unit usaha yang dikelola , kemudian penelitian ini sudah menunjukkan bahwa program bumdes sudah terlaksana dengan cukup baik serta optimal yakni terpenuhinya empat indikator implementasi BUMDes tersebut.⁶

Keempat, Jurnal dengan judul “Penerapan Sak Etap Pada Unit Jasa Pengelolaan Sampah Bumdes Desa Buduk”. Penelitian ini dilakukan oleh I Gusti Ayu Astri Pramitaril, Ketut Nurhayanti, dan Si Luh Putu Yulita Suningsih. Penelitian ini membahas mengenai BUMDes yang dimiliki oleh Desa Buduk. Pengelolaan sampah pada BUMDes ini sudah berjalan baik dan juga sudah terbangun TPST. Dalam pelaksanaanya pun bumde pengelolaan sampah ini juga sudah pada tahap pemilahan serta pengolahan sehingga sudah mampu menghasilkan pendapatan. Sampah yang diangkut dikumpulkan di TPST kemudian dipilah berdasarkan jenisnya. Sampah organik dihancurkan dengan media maggot sebagai pengurai sampah organik yang efektif. Sampah anorganik recyclable dipilah dan kemudian diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung, sedangkan sampah anorganik non-recyclable dieliminasi menggunakan mesin pencacah dan dibakar menggunakan kompor.

⁶ Happy Liow, F. D. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tondegesean Kecamatan Kewangkoan. *Jurnal Administrasi Publik* , 1-13.

Pada penelitian ini juga menjelaskan bahwa proses pembukuan dana BUMDes menggunakan Standar Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sehingga penyusunan laporan dapat dengan mudah dilakukan. Perbedaan kedua penelitian ini yakni BUMDes pengelolaan sampah di Desa Buduk sudah berjalan baik sementara bumdes pengelolaan sampah di desa Tegalweru belum berjalan secara optimal. Pada bumdes pengelolaan sampah di desa Buduk juga sudah memiliki standar pembukuan dana sehingga lebih mudah dan terinci sementara bumdes pengelolaan sampah di desa Tegalweru belum memiliki standar pembukuan.⁷

Kelima, Jurnal dengan judul “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sindangraja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini dilakukan oleh Dasep Dodi Hidayah. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan BUMDes ini belum cukup optimal. Program atau unit usaha yang dikelola BUMDes ini yakni lembaga keuangan desa dimana bergerak pada transaksi keuangan simpanan desa. Perbedaan penelitian ini yakni penggunaan teori dalam menganalisis hasil penelitian. Peneliti sebelumnya menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn.⁸

⁷ Gusti Ayu Astri Pramitari, K. N. (2020). PENERAPAN SAK ETAP PADA UNIT JASAPENGELOLAAN SAMPAH BUMDES DESA BUDUK. *Social and Humanities*, 246-253.

⁸ Hidayah, D. D. (2020). Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindangraja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 26-30.

Keenam, Jurnal berjudul “ Implementasi Kebijakan Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan oleh Joni Agung Priyanto. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dimana tingkat keberhasilan dipengaruhi oleh Isi Kebijakan dan Lingkungan Implimenetasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengembanagn BUMDes di Kabupaten Kalten belum optimal dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala yang melatarbelakangi belum optimalnya program BUMDes di Kabupaten Klaten diantaranya belum terbit peraturan Bupati yang menjadi payung hukum BUMDes, kemudian Sumber Daya Manusi yang masih terbatas , serta modal financial BUMDes yang terbatas. Perbedaan penelitian ini terdapat pada teori implementasi kebijakan yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan teori milik Merilee S.Grindle. ⁹

Ketujuh , Jurnal berjudul “ Implementasi Kebijakan Pengembangan UED-SP Menjadi BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus BUMDe Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo) yang ditulis oleh Galih Delia dari Universitas Riau tahun 2018. Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dan

⁹ Priyanto, J. A. (2020). Implementasi Kebijakan Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* , 113-124.

konsep kelembagaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dikelola yakni simpan pinjam, dimana pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal dan baik dikarenakan SDM yang belum memadai, kemudian tidak adanya SOP dalam melaksanakan BUMDes juga unit usaha yang masih minim.¹⁰

Kedelapan, Jurnal berjudul “ Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Terhadap Manajemen BUMDesa dalam Mewujudkan Efektifitas BUMDesa di Kabupaten Garut”. Penelitian dilakukan oleh Riksa Raesalat dan Ikeu Kania. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes terhadap Manajemen BUMDesa dalam di Kabupaten Garut. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria yang baik dengan nilai perentase tertinggi yakni pada sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan, kemudian nilai dengan persentase terendah yakni karakteristik organisasi. Implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap keefektifitasan BUMDes. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yakni ppada metode penelitian yakni kuantitatif serta teori implementasi kebijakan yang digunakan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn.¹¹

¹⁰ Delia, G. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan UED-SP Menjadi Bumdes di Kabupaten Rokan Hulu (studi kasus Bumdes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo). *JOM FISIP* , 1-15.

¹¹ Riksa Raesalat, I. K. (2019). Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Terhadap Manajemen BUMDesa dalam Mewujudkan Efektifitas BUMDesa di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik* , 31-36.

Kesembilan, Jurnal berjudul “ Implementasi Badan Usaha Milik Desa Citra

Tropodo Makmur di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”.

Penelitian ini dilakukan oleh Herwinda Febriani dan Tjitjik Rahayu S.Sos., M.Si.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Elmore, Lipsky, Hjern & O’Porter meliputi indikator seperti

Identifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan, kebijakan yang dibuat sesuai harapan keinginan publik yang menjadi target, kemudian prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni aktor yang terlibat terdapat hambatan atau keterlambatan dalam interaksi antar aktor jaringan yang terlibat. Kegiatan yang dijalankan pun juga sudah cukup baik masyarakat menyambut dan menerima secara positif keberadaan BUMDes, kemudian dalam rembug desa atau musyawarah pun juga berjalan dengan baik. pemerintah desa memberikan apresiasi modal sehingga BUMDes juga dapat berjalan dengan sesuai harapan dari semua pihak.¹²

Kesepuluh, skripsi dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta”.

Penelitian ini dilakukan oleh Rufaidah aslamiah. Teori yang digunakan dalam

¹² Herwinda Febriani, T. R. (2018). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Citra Tropodo Makmur di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika*, 1-7.

penelitian ini yakni teori kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh James Midgley.

Hasil penelitian ini yaitu Sejak tahun 2013 pemerintah Desa Panggungharjo memiliki aksi nyata dengan mengelola sebuah Rumah Pengelolaan Sampah (RPS). Pengelolaan sampah di desa ini didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif bisnis (usaha) oleh karena itu pengelolaan sampah ini berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari ini lahir dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan masyarakat akan banyaknya sampah yang diproduksi setiap harinya, yang tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan saja, melainkan berdampak pada kesehatan masyarakat Desa Panggungharjo.

BUMDes memberikan layanan kemanusiaan melalui KUPAS. Pelayanan yang dilakukan oleh KUPAS berfokus pada pelayanan pengolahan sampah yang dihasilkan dari sisa konsumsi masyarakat Panggungharjo. Awalnya KUPAS ini hanya sebatas mencakup pengelolaan sampah saja agar lingkungan tetap bersih tanpa diperbolehkan meraup keuntungan, namun sejak tahun 2013 KUPAS mulai melakukan penataan ulang sehingga menjadi kelompok usaha yang dapat menghasilkan pendapatan yang masuk dan diolah oleh kas desa. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian, serta pelaksanaan BUMDes pengelolaan sampah yang berbeda. Penelitian ini menjelaskan bahwa Bumdes pengelolaan sampah KUPAS sudah menghasilkan keuntungan sejak tahun 2013 dan masuk pada kas desa.

Table 1. Literature Review

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Perbedaan
1.	“ Analisis Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Roti Gulancir di Desa Sukabares Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Provinsi Banten”	BUMDes Desa Roti Gulancir di Desa Sukabares ini belum dapat berjalan dan masih dalam tahap perencanaan. Hal yang menyebabkan BUMDes ini belum dapat berjalan dikarenakan fokus pemerintah desa masih pada pembangunan infrastruktur. Kemudian hal lain yang menjadi penghambat yakni masyarakat yang memang sudah memproduksi roti gulancir dalam ranah rumahan selalu bersikap tertutup sehingga pemerintah sulit untuk melakukan pendekatan. BUMDes ini akan mulai beroperasi pada tahun 2021 ketika semua komponen yang mendasari telah lengkap.	Penelitian ini menjelaskan bahwa BUMDes masih dalam tahap perencanaan dan belum berjalan. Penelitian dilakukan di Desa Sukabares Kabupaten Serang Banten.
2.	”Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud”.	Penelitian ini menggunakan teori manajemen dari M.Suparmoko. Terdapat empat indikator yang digunakan dalam menganalisis implementasi pengelolaan BUMDes ini diantaranya Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yakni pada teori

		<p>pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal dibuktikan dengan sebagian masyarakat belum merasakan keberadaan BUMDes, kemudian jumlah dari anggota pengurus bumdes belum mencukupi, kurangnya kesadaran masyarakat ikut berpartisipasi serta dalam proses pengawasannya tidak dilakukan secara optimal.</p>	<p>yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian yakni menggunakan teori manajemen menurut M.Suparmoko.</p>
3.	<p>“ Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kewangkoan”.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Penelitian ini menunjukkan bahwa implemnetasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Desa Tondegesan sudah terlaksana dengan baik. BUMDes tersebut mengelola dua unit usaha diantaranya pemenuhan air bersih dan program peternakan. Indikator-indikator yang digunakan untuk menganalisis implemetasi pengelolaan BUMDes ini sudah terlaksana dengan baik.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yakni terdapat pada jenis unit usaha yang dikelola, kemudian penelitian ini</p>

			sudah menunjukkan bahwa program bumdes sudah terlaksana dengan cukup baik serta optimal yakni terpenuhinya empat indikator implementasi BUMDes tersebut.
4.	“Penerapan Sak Etap Pada Unit Jasa Pengelolaan Sampah BUMdes Desa Buduk”	Penelitian ini dilakukan oleh I Gusti Ayu Astri Pramitaril, Ketut Nurhayanti, dan Si Luh Putu Yulita Suningsih. Penelitian ini membahas mengenai BUMDes yang dimiliki oleh Desa Buduk. Pengelolaan sampah pada BUMDes ini sudah berjalan baik dan juga sudah terbangun TPST. Dalam pelaksanaannya pun bumde Buduk sudah pengelolaan sampah ini juga sudah	Perbedaan kedua penelitian ini yakni BUMDes pengelolaan sampah di Desa Buduk sudah

		<p>pada tahap pemilahan serta berjalan baik pengolahan sehingga sudah mampu sementara menghasilkan pendapatan. Sampah bumdes yang diangkut dikumpulkan di TPST kemudian dipilah berdasarkan pengelolaan jenisnya. Sampah organik dihancurkan sampah di desa dengan media maggot sebagai tegalweru belum pengurai sampah organik yang efektif. Sampah anorganik recyclable dipilah berjalan secara dan kemudian diserahkan kepada optimal. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan bumdes Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung, sedangkan sampah anorganik pengelolaan non-recyclable dieliminasi sampah di desa menggunakan mesin pencacah dan Buduk juga dibakar menggunakan kompor. Pada penelitian ini juga menjelaskan bahwa sudah memiliki proses pembukuan dana BUMDes standar menggunakan Standar Penyusunan pembukuan Laporan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dana sehingga penyusunan laporan dapat lebih mudah dan dengan mudah dilakukan.</p> <p>terinci sementara bumdes pengelolaan</p>
--	--	---

			sampah di desa Tegalweru belum memiliki standart pembukuan.
5. “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sindangraja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya”.	Penelitian ini dilakukan oleh Dasep Dodi Hidayah. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakn yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan BUMDes ini beum cukup optimal. Program atau unit usaha yang dikelola BUMDes ini yakni lembaga keuangan desa dimana bergerak pada transaksi keuangan simpanan desa.	Perbedaan penelitian ini yakni penggunaan teori dalam menganalisi hasil penelitian. Peneliti sebelumnya menggunakan teori impementasi kebiakan Van Metter dan Van Horn.	

6.	“ Implementasi Kebijakan Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah	Penelitian ini menggunakan teori Perbedaan penelitian ini Implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dimana tingkat terdapat pada keberhasilan dipengaruhi oleh Isi teori Kebijakan dan Lingkungan implementasi Implmenetasi. Hasil penelitian kebijakan yang menjelaskan bahwa pengembanagn digunakan untuk BUMDes di Kabupaten Kaltan belum menganalisis optimal dalam pelaksanaannya. hasil penelitian. Kendala-kendala yang teori melatarbelakangi belum optimalnya S.Grindle. program BUMDes di Kabupaten Klaten diantaranya belum terbit peraturan Bupati yang menjadi payung hukum BUMDes, kemudian Sumber Daya Manusi yang masih terbatas , serta modal financial BUMDes yang terbatas.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada
7.	“ Implementasi Kebijakan Pengembangan UED-SP Menjadi BUMDes di	Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori implementasi	Perbedaan penelitian ini terdapat pada

	Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo)	kebijakan menurut George Edward III dan konsep kelembagaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dikelola yakni simpan pinjam, dimana pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal dan baik dikarenakan SDM yang belum memadai, kemudian tidak adanya SOP dalam melaksanakan BUMDes juga unit usaha yang masih minim.	fokus dimensi yang dianalisis peneliti sebelumnya yakni sumberdaya dan struktur birokrasi yang berada dalam teori Implementasi kebijakan menurut George Edward III.
8.	“ Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Terhadap Manajemen BUMDesa dalam Mewujudkan Efektifitas BUMDesa di Kabupaten Garut”	Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes terhadap	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yakni pada metode penelitian yakni kuantitatif serta

		Manajemen BUMDesa dalam di Kabupaten Garut. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria yang baik dengan nilai perentase tertinggi yakni pada sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan, kemudian nilai dengan persentase terendah yakni karakteristik organisasi. Implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap keefektifitasan BUMDes.	teori implementasi kebijakan yang digunakan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn.
9.	“ Implementasi Badan Usaha Milik Desa Citra Tropodo Makmur di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”	Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Elmore, Lipsky, Hjern & O’Porter meliputi indikator seperti Identifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan, kebijakan yang dibuat sesuai harapan keinginan publik yang menjadi target, kemudian	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yakni terletak pada teori implementasi kebijakan yang digunakan untuk menganalisis yakni menggunakan teori implementasi

		<p>prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni aktor yang terlibat terdapat hambatan atau keterlambatan dalam interaksi antar aktor jaringan yang terlibat. Kegiatan yang dijalankan pun juga sudah cukup baik masyarakat menyambut dan menerima secara positif keberadaan BUMDes, kemudian dalam rembug desa atau musyawarah pun juga berjalan dengan baik. pemerintah desa memberikan apresiasi modal sehingga BUMDes juga dapat berjalan dengan sesuai harapan dari semua pihak</p>	<p>kebijakan yang dikemukakan oleh Elmore, Lipsky, Hjern dan O'Porter.</p>
10	<p>“Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui</p>	<p>Sejak tahun 2013 pemerintah Desa Panggungharjo memiliki aksi nyata dengan mengelola sebuah Rumah Pengelolaan Sampah (RPS).</p>	<p>Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada teori yang digunakan untuk</p>

<p>Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta”.</p>	<p>Pengelolaan sampah di desa ini didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif bisnis (usaha) oleh karena itu pengelolaan sampah ini berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari ini lahir dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan masyarakat akan banyaknya sampah yang diproduksi setiap harinya, yang tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan saja, melainkan berdampak pada kesehatan masyarakat Desa Panggungharjo. BUMDes memberikan layanan kemanusiaan melalui KUPAS. Pelayanan yang dilakukan oleh KUPAS berfokus pada pelayanan pengolahan sampah yang dihasilkan dari sisa konsumsi</p>	<p>menganalisis penelitian, serta pelaksanaan BUMDes pengelolaan sampah yang berbeda. Penelitian ini menjelaskan bahwa Bumdes pengelolaan sampah KUPAS sudah menghasilkan keuntungan sejak tahun 2013 dan masuk pada kas desa sementara BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru masih merintis dan belum dapat menghasilkan keuntungan.</p>
--	--	---

		<p>masyarakat Panggunharjo. Awalnya KUPAS ini hanya sebatas mencakup pengelolaan sampah saja agar lingkungan tetap bersih tanpa diperbolehkan meraup keuntungan, namun sejak tahun 2013 KUPAS mulai melakukan penataan ulang sehingga menjadi kelompok usaha yang dapat menghasilkan pendapatan yang masuk dan diolah oleh kas desa.</p>
--	--	--

Sumber : Hasil Olahan Peneliti , 2021

2.2 Kerangka Teoritik

2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan sebuah kajian terkait dengan proses pelaksanaan kebijakan publik. Sebuah implementasi kebijakan publik sangat perlu dipersiapkan dengan baik sehingga tujuan dari kebijakan publik yang telah dibentuk dapat tercapai dengan semestinya. Impementasi kebijakan ini sangatlah penting dan perlu untuk dilakukan sehingga kebijakan tidak hanta terbentuk secara sia-sia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan

oleh Udoji dalam Wahab bahwa “pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersusun rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.¹³

Implementasi Kebijakan Publik ini dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa model implementasi kebijakan. Dalam studi kebijakan publik sendiri terdapat banyak model implementasi kebijakan publik. Dalam pendekatannya pun implementasi kebijakan publik ini terdapat tiga macam yakni model *bottom up*, *top down* dan *mix* yang terdiri dari *bottom up* serta *top down*. Model implementasi kebijakan publik *topdown* ini diantaranya Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), George Edward III (1980), Merilee Grindle (1980), Daniel Mazmaniar dan Paul A. Sabatier (1983). Model-model implementasi kebijakan publik digunakan dalam menganalisis dan mengetahui bagaimana proses kebijakan publik itu berlangsung.

Proses sebuah implementasi kebijakan akan mulai ketika tujuan serta sasaran telah ditetapkan dan adanya program kegiatan yang tersusun serta dana yang dibutuhkan telah siap sehingga akan mencapai sasaran nantinya. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Parsons dan Wibawa bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi)

¹³P. Koton, E. Z. (2017). *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan¹⁴.

2.2.2 Model Kebijakan Menurut George C. Edward III

George Edwards III (1980) menyampaikan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat dua pertanyaan penting yaitu, kondisi apa yang diperlukan sehingga kebijakan tersebut sukses? Dan faktor dan hambatan apa saja yang membuat suatu kebijakan dapat dikatakan gagal? Dengan munculnya pertanyaan tersebut maka Edward berusaha menjawab dengan menggunakan empat variabel yang sangat mempengaruhi Implementasi Kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Organisasi.¹⁵

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting dikarenakan pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Perintah agar melaksanakan kebijakan harus disampaikan kepada implementor secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumberdaya juga akan mengakibatkan ketidak-efektifan penerapan kebijakan. Disposisi maupun kecenderungan sikap pelaksana dapat diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan pada kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan memiliki

¹⁴Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 2.

¹⁵Kadji, Yulianto, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*, Gorontalo: UNG Press, 2015, hlm. 63

kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan. Dalam implementasi kebijakan perlu tujuan dan sasaran yang jelas agar tidak terjadi distorsi informasi bagi pihak yang terdampak dari kebijakan yang dikeluarkan. Jika kebijakan yang diambil tidak menetapkan tujuan dan sasaran bahkan yang lebih buruk lagi tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kebijakan yang dikeluarkan akan mendapat penolakan dari kelompok sasaran karena kelompok sasaran dari kebijakan tersebut tidak mengetahui maksud dan tujuan yang ditetapkan kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada implementator dengan jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah fakta penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan tidak akan dapat terealisasi.

Sumberdaya yang penting antara lain jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijakan, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan, serta dukungan fasilitas, termasuk sarana/prasarana, dan aktivitas untuk memberikan pelayanan publik.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka keinginan dari pembuat kebijakan akan tersampaikan dan tujuan dari kebijakan itu di keluarkan akan tersampaikan dan terlaksana dengan baik, sehingga proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pada dasarnya yang bertugas mengimplementasikan kebijakan sehingga menjadi faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal yang menjadi sorotan dalam struktur

birokrasi ini adalah SOP (standard operating procedures). SOP ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengimplementator kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakannya. Misalnya jika struktur birokrasi atau organisasi yang kaku akan membuat pengawasan terhadap kebijakan tersebut sulit karena prosedur birokrasi yang kompleks dan rumit.

2.2.3 Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Menteri Desa PDTT No.4 Tahun 2015). BUMDes yang merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Permen Dalam Negeri No.39 Tahun 2004). Pengaturan mengenai BUMDesa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Selanjutnya BUMDesa diatur

dalam Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDesa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dasar pemikiran pendirian BUMDesa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa yang dikelola secara profesional dan kekeluargaan guna mengali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.

¹⁶ Rizqi, A. R. (2019). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 27-40.

2.3 Kerangka Pikir

Bagan 1. Alur Pikir

Permasalahan :

- Pengelolaan sampah yang belum optimal.
- BUMDes belum berjalan optimal sesuai potensi masyarakat.
- Keterbatasan Sumberdaya Manusia Pengelola BUMDes

Regulasi :

- Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan dan Daerah Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pengelolaan BUMDes di
Desa Tegalweru

Teori Implementasi Kebijakan Model George C.Edward III :

1. Komunikasi (Transmisi, Kejelasan, Konsisten)
2. Sumber Daya (Staff, Informasi, Wewenang, Fasilitas)
3. Disposisi (Pengangkatan Birokrat dan Insentif)
4. Struktur Birokrasi (SOP dan Fragmentasi)

Hasil Penelitian :

1. Komunikasi : Komunikasi yang dilakukan antar pihak yang terlibat dalam BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru belum optimal. Proses komunikasi seperti rapat maupun monitoring yang seharusnya dilakukan tdiak terwujud. Kurangnya koordinasi dengan pihak DLH juga menjadikan permasalahan sampah ini belum dapat teratasi.
2. Sumber daya : Sumber daya manusia maupun sumber dana belum dapat terpenuhi dnegan optimal. Para pengurus BUMDes pengelolaan sampah yang tidak kompeten serta mumpuni menjadikan proses implementasi tidak berjalan sesuai sasaran awal. Kemudian sumber dana tidak mencukui juga menjadi salah satu kendala BUMDes pengelolaan sampah ini tidak berkembang.
3. Disposisi/Sikap Pelaksana Kebijakan : Sikap para pihak pelaksana kebijakan program BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru ini menerima dan melaksanakan kebijakan, akan tetapi dalam pelaksanaanya belum mendapatkan hasil yang optimal karena kurangnya pemahaman dan kesiapan dari berbagai faktor.
4. Struktur Birokrasi : BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru ini sudah memiliki SOP yang digunakan sebagai pedoman proses kerja para pengurus. Indikator ini pun juga belum optimal karena SOP yang ada tidak dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Terdapat banyak poin-poin SOP yang tidak dilaksanakan sehingga keberasaan SOP belum cukup membantu keberhasilan implementasi BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru tersebut.

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Donald Ary, menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang dalam rangka memperoleh informasi pada saat dilakukan penelitian. Jenis penelitian ini tidak memberikan perlakuan khusus terhadap objek penelitian seperti yang dilakukan di penelitian eksperimen.¹⁷ Dengan begitu dimaksudkan bahwa deskripsi hasil dari penelitian sesuai dengan apa yang ada dilapangan.

Adapun metode penelitian kualitatif ialah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menginterpretasikan permasalahan dala kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan dan sebagainya.¹⁸ Penelitian ini mendeskripsikan dan merangkum tentang berbagai situasi pada Implementasi Kebijakan BUMDes DEWANDARU Desa Tegalweru Kecamatan DAU Kabupaten Malang.

3.2 Lokasi Penelitian

¹⁷Prastowo, A. (2016). *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

¹⁸Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lokasi penelitian ini merupakan letak dimana penelitian akan dilakukan dalam rangka menggali dan mencari informasi ataupun data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Lokasi pada penelitian ini yakni berada di Desa Tegalweru, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang. Hal tersebut didasari oleh alasan bahwa yang menjadi objek penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Tegalweru.

3.3 Fokus Penelitian

Melalui fokus penelitian ini dapat memberikan batasan dalam penelitian dengan tujuan agar tidak terjadi bias data yang diambil. Pada penelitian ini yang menjadi fokus untuk diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan BUMDes DEWANDARU yang ada di Desa Tegalweru Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. BUMDes sendiri merupakan salah satu pendorong perekonomian bagi suatu desa dimana nantinya diharapkan dapat menambah pendapatan asli desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatb desa itu sendiri.

3.4 Sumber Data

1. Data primer

Data primer sendiri merupakan pengambilan data dengan cara langsung pada subjek penelitian. Data yang diperoleh berupa data yang berkaitan dengan informasi yang dapat menjawab rumusan masalah

penelitian. Data primer dalam penelitian ini diantaranya hasil wawancara dengan informan.

Table 2. Informan Penelitian

NO	Informan
1	Indra Cahyo Wibowo (Ketua BUMDes Desa Tegalweru)
2	Bpk. Yasmadi (Sekretaris Desa Tegalweru)
3	Ibu Ning (Warga Desa Tegalweru)
4	Bpk. Mawan (Pemulung TPA Desa Tegalweru)
5	Bpk. Ariful (Bagian Unit Sampah)
6	Bpk. Hari (Bagian Unit Pengambilan Sampah)

Sumber : Olahan Penulis, 2021

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia yang biasanya diperoleh dari sebuah instansi. Adapun yang termasuk data sekunder yakni catatan, arsip dan dokumen. Data sekunder yang peneliti gunakan yakni dokumen-dokumen yang berkaitan dengan BUMDes Desa Tegalweru.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, metode atau teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, penentuan metode yang tepat sangatlah

diperlukan. Pemilihan metode yang tepat akan mempengaruhi objektivitas hasil dari penelitian yang dilakukan. Terdapat beberapa cara dalam melakukan penelitian ini diantaranya yakni dengan wawancara. Observasi, dokumentasi. Teknik pengumpulan data menurut Arikunto yakni :¹⁹

a. Wawancara yaitu mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui Tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten guna dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian terkait pengelolaan BUMDes di Desa Tegalweru. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti terkait pengelolaan BUMdes. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang dianggap peneliti mampu untuk menjawab pertanyaan mengenai pengelolaan BUMDes di Desa Tegalweru.

b. Observasi yakni proses pengumpulan data dengan cara langsung maupun tidak langsung pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Observasi digunakan untuk mengamati terkait program atau kegiatan yang sedang dilakukan seperti halnya pelaksanaan awal pendirian BUMDes di Desa Tegalweru, tahap pengelolaan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan BUMdes

¹⁹Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

di Desa Tegalweru , serta dukungan dari pemerintah desa Tegalweru sendiri terhadap program BUMDes di Desa Tegalweru tersebut.

- c. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian, dokumen dapat dijadikan sebagai bukti suatu penelitian atau pengujian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang ada di Desa Tegalweru sendiri serta data-data lain yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian dan hasil temuan di lapangan. Data yang dikumpulkan pun berupa arsip, foto, draf dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat dilakukan wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban tersebut kurang memuaskan, maka peneliti akan memberikan pertanyaan lagi hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Adapun analisis data menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono sebagai berikut:²⁰

²⁰Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

- a. Pengumpulan Data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data terkait dengan pengelolaan BUMDes unit sampah di Desa Tegalweru.
- b. Reduksi Data yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, sedangkan data yang tidak perlu disortir agar dapat memudahkan dalam menyajikan data. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh mengenai implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Desa Tegalweru. Data-data yang diperoleh berupa hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa informasn yang berkaitan dengan BUMDes Desa Tepakweru tersebut.
- c. Penyajian Data yakni data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan menurut kategori yang sejenis untuk ditampilkan sesuai dengan fokus pada permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat reduksi. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik dan bagan yang berkaitan dengan BUMDes di Desa Tegalweru.

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BADAN USAHA MILIK DESA DEWANDARU DI DESA TEGALWEU, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri memiliki beberapa jenis klasifikasi usaha diantaranya *Serving*, *Banking*, *Renting*, *Brokering*, *Trading*, *Holding*.²¹ Maksud dari jenis usaha BUMDes ini yakni *Serving* merupakan jenis usaha yang tidak dapat menghasilkan untung yang besar untuk warga tetapi memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. *Banking* ini jenis usaha BUMDes yang berjalan pada bisnis uang dengan bunga yang lebih rendah dari bank konvensional. Kemudian *Renting* jenis usaha yang berfokus pada penyewaan kebutuhan masyarakat. *Brokering* merupakan usaha dimana BUMDes menjadi suatu wadah yang menjadi perantara komoditas pertanian dengan pasar. *Trading* yakni jenis usaha tertentu yang dimaksudkan untuk memenuhi keperluan masyarakat ataupun dipasarkan pada tingkatan pasar yang lebih luas. Klasifikasi jenis usaha BUMDes yang terakhir yakni *Holding* yakni jenis usaha bersama yang dimiliki BUMDes sendiri agar unit dapat lebih berkembang.

Berdasarkan uraian berbagai klasifikasi jenis usaha BUMDes di atas, maka BUMDes di Desa Tegalweru ini termasuk pada jenis usaha *Serving*. Hal ini

²¹Dirgantiana, Y, Skripsi : PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)” (Malang : Universitas Brawijaya, 2017), 51.

didasarkan pada program BUMDes Tegalweru yakni unit sampah. Dimana pelaksanaan program sampah ini lebih pada memberikan manfaat sosial bagi masyarakat serta lingkungan. Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dengan adanya pengelolaan sampah desa ini yakni mengurangi jumlah sampah yang dibuang secara sembarangan baik di selokan maupun di sungai yang mengakibatkan banjir.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir setidaknya terjadi sebanyak 2 sampai 3 kali banjir dengan kondisi terparah terjadi pada awal tahun 2020. Banjir yang terjadi di Desa Tegalweru setidaknya menyebabkan sebanyak 5 orang luka karena kendaraan ikut terseret oleh arus air hujan yang mengakibatkan sungai meluap ke jalanan. Derasnya air hujan juga mengakibatkan putusnya jembatan yang menjadi akses penghubung antar desa. Selain itu banyak sampah yang masuk ke rumah-rumah warga terutama yang berada di dekat sungai. Menurut warga sekitar ketinggian air banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 tersebut hingga sekitar betis orang dewasa.²²

Seperti yang dijelaskan bahwasannya sampah yang ada di desa Tegalweru ini menjadi salah satu masalah yang cukup meresahkan. Hal ini dikarenakan masyarakat banyak yang membuang sampahnya di sungai maupun selokan sehingga ketika hujan dengan intensitas yang besar mengakibatkan sampah akan membludak kejalan bahkan tidak jarang mengakibatkan banjir.

“Jadi awal mulanya itu karena memang sampah di desa itu buanyak dan terbuang sembarangan. Kalau hujan pasti sampah naik sampek ke jalan-jalan jadi kemudian kita mikir bagaimana caranya masalah

²² Hasil wawancara peneliti Bapak Hari (Bagian unit sampah)

sampah ini bisa diatasi begitu, nah makanya di bentuk bumdes ini agar pengelolaannya juga jelas”²³

Oleh karena itu pemerintah Desa Tegalweru memutuskan bahwa pengolahan sampah menjadi salah satu unit program yang dijalankan BUMDes. Dalam pengelolaannya warga akan mengumpulkan sampah di rumah masing-masing, kemudian nanti akan ada petugas yang akan mengambil sampah tersebut kemudian nanti akan didistribusikan ke tempat pembuangan akhir desa seterusnya akan diambil oleh DLH. Pengambilan sampah ke rumah-rumah warga dilakukan dua hari sekali dalam seminggu dengan iuran sebesar sepuluh ribu setiap bulannya. Sampah yang diambil pun tidak dipilah dahulu, melainkan langsung semua sampah di ambil. Warga desa di beri instruksi untuk mengumpulkan sampah di kantong dan tidak boleh dibuang sembarangan sampai nantinya petugas pengambil sampah akan datang. Kendala yang dialami dalam pengelolaan sampah ini adalah banyaknya jumlah sampah yang tidak sesuai dengan kapasitas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Desa Tegalweru. Setidaknya terdapat sekitar 2 ton sampah yang dihasilkan setiap harinya dengan rata-rata per rumah tangga 1,5 sampai 2 kg. Ukuran TPA sampah yang tidak terlalu besar menjadikan sampah yang dikumpulkan dari warga Desa Tegalweru tidak dapat semuanya tertampung. Bahkan tersedianya kontainer yang ada di TPA juga tidak dapat banyak membantu, sehingga seringkali sampah menggenung dan melebar hingga hampir ke jalan raya. Hal ini ditambah dengan intensitas

²³Hasil wawancara dengan Bpk. Indra, Ketua BUMDes Desa Tegalweru.

pengambilan sampah oleh DLH yang hanya dilakukan dua kali dalam seminggu, sedangkan pengumpulan sampah dilakukan tiga kali seminggu. Dengan demikian, permasalahan sampah di Desa Tegalweru belum dapat diatasi secara optimal.

4.1 KOMUNIKASI

Berdasarkan teori menurut George Edward III yaitu variabel pertama yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan/program adalah mengenai komunikasi. Dalam variabel ini, para pelaksana kebijakan harus mampu memahami bagaimana keinginan dari pembuat kebijakan. Keberhasilan implementasi program ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) kepada para pelaksana program. Pelaksana program BUMDes di Tegalweru adalah kerja sama antara pemerintah desa dengan pegawai yang mengelola BUMDes secara langsung. Dengan begitu diharuskan pihak Pemerintah desa Tegalweru dan pegawai pengelola BUMDes memahami sepenuhnya kebijakan yang telah dibuat tersebut. Proses komunikasi yang dilakukan terkait pendirian BUMDes ini terjadi pada 17 Desember 2019.²⁴ Diharapkan akan ada kesinambungan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian program BUMDes tersebut. Adapun program yang saat ini sudah dibuat dan dilaksanakan adalah pengelolaan sampah yang ada di Desa Tegalweru. Tahap awal pengimplementasian BUMDes unit pengelolaan sampah ini telah dibangun TPA yang

²⁴ Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Tegalweru Kecamatan DAU Kabupaten Malang.

digunakan untuk menampung sampah. Namun demikian kondisi TPA Tegalweru belum mampu menampung seluruh sampah dari warga desa.

Dalam tahap implemetasi, kebijakan akan berjalan dengan efektif jika tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan ketepatan komunikasi dan juga penekanan sasaran serta tujuan dari kebijakan dengan para pelaksana. Proses komunikasi yang dilakukan tersebut haruslah konsisten. Hal ini diperlukan agar komunikasi satu organisasi atau antar organisasi dapat berjalan baik karena komunikasi sendiri merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam proses implementasi. Apabila terjadi miskomunikasi baik itu antar individu atau antar organisasi yang melaksanakan kebijakan, maka kebijakan akan cenderung mengalami kegagalan. Membangun sebuah komunikasi yang baik antar individu maupun antar organisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan para pengelola BUMDes pengelola sampah di Desa Tegaweru untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di desa. Pemerintah Desa Tegalweru beserta para pengelola BUMDes bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam upayanya menangani permasalahan sampah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Indra selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa :

“ Untuk saat ini kita hanya bisa kerjasama dengan DLH saja untuk mengangkutan dan pembuangan sampah setelah dari TPA. Karena memang kita ini pengelolaan saja bukan pengolahan jadi sementara sampah hanya dikumpulkan dari warga kemudian dikumpulkan ke TPA dan nanti selanjutnya diambil DLH”²⁵

²⁵ Wawancara peneliti dengan Ketua Badan Usaha Milik Desa Tegalweru bapak Indra Cahyo Wibowo.

Kerjasama yang dilakukan bumdes pengelolaan sampah dengan DLH hanya sebatas pengangkutan sampah saja. Intensitas pengambilan sampah yang dilakukan DLH pun juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengurus bumdes. Pengurus bumdes mengharapkan pengangkutan sampah dilakukan tiga kali seminggu namun, hal tersebut tidak selaras dengan yang dilakukan oleh DLH yang hanya dilakukan dua kali seminggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses kerjasama dan komunikasi yang dilakukan belum optimal dan belum sesuai dengan sasaran serta tujuan bumdes. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Hari selaku unit bagian pengelola sampah;

“sebenarnya kita mengharapkan adanya tambahan pengangkutan dari DLH, jadi sampah yang di TPA tidak terlalu menumpuk. Kita sudah coba komunikasikan ke DLH dan minta penambahan tapi tetap tidak bisa dan tetap dilakukan dua kali seminggu”²⁶

Kemudian proses komunikasi yang terjalin antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru belum optimal dan konsisten. Hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan rapat pengurus bumdes yang seharusnya dilakukan tiga bulan sekali belum dapat terealisasi. Belum terealisasinya rapat pengurus secara rutin tersebut menunjukkan bahwa proses pengimplementasian program bumdes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru ini belum tercapai. Rapat pengurus seharusnya menjadi salah satu prosedur penting yang dilakukan sehingga prospek kerja bumdes dapat ditingkatkan. Proses pengawasan terhadap pengimplementasian bumdes pengelolaan sampah ini juga belum optimal.

²⁶ Wawancara peneliti dengan bapak Hari bagian unit pengelolaan sampah.

Monitoring yang seharusnya dilakukan secara kerjasama oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pembina maupun Pengurus BUMDes juga belum terealisasi.

Kegiatan monitoring hanya dilakukan oleh pengurus bumdes unit pengelolaan sampah saja.

“selama berjalan ini ya cuma kita aja mbak yang menjalankan, yang mengawasi juga sekalian. kalau pemerintah desa ya biasa begitulah terima jadi aja. Cuma ya kitanya memang niatnya biar sampah ini gak tambah membludak yawes gitu aja mbak”

4.2 SUMBER DAYA

Berdasarkan teori implementasi menurut George Edward III, variabel kedua yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah mengenai sumber daya pelaksana kebijakan. Variabel ini para pelaksana kebijakan harus memenuhi sumber daya kebijakan. Sumber daya yang dimaksudkan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya financial. Selain memenuhi kedua jenis sumber daya tersebut, pelaksana kebijakan yaitu pihak pemerintah desa maupun pengurus bumdes juga diharapkan mampu memanfaatkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya yang telah tersedia.

Sumber daya manusia juga menjadi penentu implementasi suatu kebijakan, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan implementasi perlu dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan mumpuni. Dengan adanya sumber daya yang kompeten dan mumpuni diharapkan dapat melaksanakan sesuai dengan sasaran dan target dari program tersebut. Dalam hal ini implementasi program bumdes

pengelolaan unit sampah diharap memiliki sumber daya manusia yang kompeten agar dapat mengelola dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk mendukung tercapainya tujuan program bumdes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru maka, diperlukan staf atau pegawai yang kompeten dalam bidangnya. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai. Pada pengeloa BUMDes di Desa Tegalweru dalam menjalankan tugasnya untuk mengimplementasikan program BUMDes ini dibuat struktur pengurus diantaranya :

Table 3. Latar Belakang Pendidikan Pengurus BUMDes Dewandaru Desa Tegalweru

NO	Nama	Tingkat Pendidikan
1	Indra Cahyo Wibowo	Sekolah Menengah Atas
2	Febri Afan Al Kahfi	Sekolah Menengah Atas
3	Mudrikah	Sekolah Menengan Atas
4	Mujianto	Sekolah Menengah Atas
5	Ariful	Sekolah Menengah Atas
6	Hari	Sekolah Menengah Atas
7	Edi	Sekolah Menengah Atas

Sumber : Olahan Penulis, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat dari latar belakang para pengurus BUMDes Dewandaru Desa Tegalweu. Tingkat pendidikan dari pengurus menjadi indikator sumber daya manusia indikator pengimplementasikan BUMDes tersebut. Dengan latar belakag seluruh pengurus yaitu pendidikan terakhirnya sekolah menengah atas,

dan tidak ada yang bergelar sarjana. Sesuai dengan yang dikatakan Bapak Indra selaku Ketua Bumdes :

“ kalau pendidikan kita memang semua tamatan SMA saja mbak tidak ada yang tamatan perkuliahan, tetapi kita dipilih memang karena dianggap berpengalaman ”

Dalam pengimplementasian BUMDes unit pengelolaan sampah yang menjadi penanggung jawab operasionalnya yaitu Bapak Ariful dengan memiliki dua pegawai Bapak Hari dan Bapak Edi. Walaupun dalam tim unit pengelola sampah bukan orang-orang yang memiliki gelar sarjana tetapi mereka dianggap mampu menjalankan tugas dan berpengalaman. Pada awal pendirian para pengurus BUMDes Desa Tegalweru ini sudah diberikan pelatihan. Seperti yang telah disampaikan Bapak Indra selaku Ketua BUMDes :

“ sebelumnya untuk pengurus BUMDes ini memang sudah pernah dilakukan pelatihan, dan juga ketika musyawarah bersama itu diberi petuah-petuah bagaimana nantinya BUMDes ini berjalan. Kami sama-sama belajar bagaimana mengelola BUMDes ini supaya nantinya bisa menjadi berkelanjutan begitu ”

Meskipun pada awal berdirinya BUMDes ini sudah dilakukan beberapa persiapan seperti pelatihan yang diberikan kepada para pengurus, akan tetapi pada pelaksanaannya sumber daya manusia belum mampu melakukan tugasnya dengan optimal. Pelatihan yang dilakukan pun juga tidak dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sehingga kemampuan pengurus BUMDes pun juga terbatas. Seperti yang diketahui bahwa latar belakang pendidikan para pengurus BUMDes di Desa

Tegalweru ini hanya sampai Sekolah Menengah Atas, sehingga jika pelatihan hanya dilakukan sekali diawal tanpa adanya pelatihan-pelatihan lain selanjutnya maka keilmuan pengurus tidak dapat berkembang. Masih sangat dibutuhkan bimbingan mengenai pelaksanaan BUMDes terutama dalam pengelolaan sampah sehingga tujuan dapat mencapai sasaran seperti yang diinginkan. Minimnya sumber daya manusia yang kompeten dan mumpuni dapat menjadi penghambat kemajuan BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru.

Selanjutnya jumlah pegawai unit pengelolaan sampah ini sangat minim. Jumlah pegawai unit sampah hanya terdapat 3 orang yakni 1 orang sebagai penanggungjawab dan 2 orang lainnya bertugas mengambil sampah-sampah warga untuk dikumpulkan di TPA. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai kurang memadai karena tidak sebanding dengan banyaknya sampah yang dihasilkan oleh warga Desa Tegalweru seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Tidak memadainya jumlah pegawai ini lah yang mengakibatkan pengambilan sampah belum dapat dilakukan pada seluruh RT yang ada di Desa Tegalweru. Kemudian juga berpengaruh pada ketidakefektifan proses pengelolaan BUMDes. Pegawai BUMDes unit pengelolaan sampah belum mampu memberikan kontribusi lebih pada proses pelaksanaan pengelolaan sampah.

Sementara itu pada aspek sumberdaya yang meliputi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program belum cukup memadai, hal ini

dibuktikan dengan masih minimnya alat yang digunakan untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga. Pengangkutan sampah dari seluruh warga hanya menggunakan satu tosa saja, dan hal tersebut mengakibatkan kurang efisien.

Table 4. Sarana dan Prasarana BUMDes Unit Pengelolaan Sampah

NO	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Fungsi
1.	Tossa (Motor angkut sampah).	1	Digunakan untuk mengangkut dan mengambil sampah dari warga.
2.	Tong Sampah Karet	72	Digunakan untuk menampung sampah-sampah warga sebelum diambil dan diangkut ke TPS sampah.
3.	Sepatu Boot	2	Digunakan untuk pelindung kaki saat pengambilan sampah.
4.	Keranjang	2	Digunakan untuk mengambil sampah yang tidak bisa dijangkau menggunakan motor angkut langsung.
5.	Sekop	2	Digunakan untuk memindahkan sampah.

Sumber : Data dari pembukuan BUMDes Unit Sampah

Tabel ini menunjukkan daftar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di BUMDes Dewandaru. Jika dilihat fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BUMDes untuk menunjang

pengelolaan sampah tergolong minim. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya ada satu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah, sehingga pihak yang bertugas mengambil sampah kesulitan untuk melakukan pengambilan dalam sekali jalan. Kemudian untuk fasilitas lain seperti tong sampah, hanya tersedia 72 unit tong sampah karet yang peletakkannya pun tidak semua berada di depan rumah warga. Selain itu minimnya sarana dan prasarana lainnya seperti BUMDes di Desa Tegalweru belum memiliki bangunan fisik sendiri dan masih menumpang di kantor desa.

Kemudian pada aspek sumberdaya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan BUMDes di Desa Tegalweru ini berasal dari dana desa dan iuran dari warga. Modal yang dibeikan dari desa sebesar 50 juta yang kemudian dibagi pada unit sampah kurang lebih sebesar 30 juta. Meskipun demikian dana yang dimiliki juga masih tergolong minim sehingga sering terjadi defisit.

Dana modal awal yang diberikan dari pemerintah desa untuk pengimplementasian program BUMDes pengelolaan sampah ini tidak cukup, maka selanjutnya pengurus bumdes menggunakan dana iuran warga untuk menunjang pelaksanaan tersebut.

“Begini awal berdiri itu kita diberikan penanaman modal dan kita coba untuk memanage dana itu dan kita belikan seperlunya. Untuk kemarin pada unit sampah itu seperti tosa itu, tapi untuk hal-hal lain ya kita ambilkan dari hasil iuran warga itu. Dan sementara ini dari bumdes berdiri sampai sekarang ini pengurus bumdes belum mendapat insentif, jadi sukarela kita mau membangun dulu. Kalau

sudah benar-benar surplus dan kegiatan masih meraba-raba ya swadaya kabeh lah. Kemarin kita dikasih modal 50 juta”²⁷

Table 5. Modal Awal BUMDes

No	Daftar Penggunaan Dana	Jumlah
1.	Pembangunan TPS	Rp 7.800.000
2.	Pembelian Tossa	Rp 8.000.000
3.	Perbaikan Kontainer	Rp 10.000.000
4.	Pembelian Tong Sampah	Rp 3.600.000
5.	Pembelian alat-alat kebersihan	Rp 600.000
TOTAL		Rp 30.000.000

Sumber : Data dari pembukuan BUMDes Unit Sampah

Tabel di atas merupakan tabel berisikan daftar penggunaan modal awal yang dimiliki oleh BUMDes. Sejalan dengan pernyataan Ketua BUMDes bahwa modal yang diterima sebanyak 30 juta untuk bagian unit pengelolaan sampah.

Jumlah tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pengelolaan BUMDes seperti yang tertera pada tabel. Kemudian sumber dana yang digunakan untuk proses pelaksanaan operasional pengelolaan sampah diperoleh dari iuran warga yang mengikuti program BUMDes pengelolaan sampah. Pelaksanaan operasional pengelolaan sampah meliputi biaya gaji karyawan unit sampah, pembelian bensin, biaya pembayaran dumtruk pengangkutan sampah dari TPA sampai ke DLH, biaya perbaikan tossa, biaya

²⁷Hasil wawancara dengan Bpk. Indra Ketua BUMDes.

pembayaran listrik TPA. Iuran sampah warga dibayarkan setiap bulan dengan tarif sepuluh ribu rupiah setiap kepala keluarga.

“jadi kita kalo yang dipakai buat pelaksanaan operasional sampah ini pakai iuran dari warga. Tpa warga itu dimintai 10 ribu mbak sebenarnya, tapi kan kadang ada yang ngasih lebih kadang juga kurang mbak. Jadi kalo minus itu karena siklus pembayaran orang kan telat. Terus kalo ada kerusakan tossa juga kan dipake buat perbaikan”

4.3 DISPOSISI

Berdasarkan teori implementasi menurut George Edward III, variabel ketiga harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah mengenai Disposisi atau sikap pelaksana. Dalam variabel ini kebijakan publik biasanya bersifat top-down sehingga pengambil keputusan cenderung tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh permasalahan yang seharusnya diselesaikan. Dalam implementasi program BUMDes dapat diketahui apakah kebijakan publik yang dibuat telah menyentuh kebutuhan dan keinginan masyarakat atau dapat menyelesaikan permasalahan yang harus diselesaikan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan berdasarkan George Edward III sangat dipengaruhi oleh sikap dari pelaksana kebijakan dalam menerima kebijakan tersebut. Kebijakan tidak akan terlaksana tanpa ada perangkat yang mewujudkan kebijakan tersebut. Perangkat atau implemetor kebijakan ini adalah para pegawai pengurus BUMDes Dewandaru terutama unit pengelola sampah. Jika terdapat penolakan terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik, sehingga akan mempengaruhi

tujuan dari implementasi kebijakan yang akhirnya tidak optimal. Pada pengimplementasian program BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru ini para staf pengelola menerima tugas yang diberikan namun, dalam pelaksanaannya belum mendapatkan hasil yang optimal.

Peneliti berkesimpulan bahwa para pengelola sudah menerima program tersebut untuk dilaksanakan dan memahami sesuai dengan peraturan Desa Tegalweru tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Tegalweru Nomor 6 Tahun 2019. Dimana pihak pengeloa BUMDes pengelola unit sampah ini mengemban peran penting dalam mewujudkan menyelesaikan permasalahan sampah di Desa Tegalweru demi terwujudnya kesejahteraan sosial dan lingkungan desa.

“iya sedari awal BUMDes berdiri kita beusaha menjalankan tugas kita. Kita sudah melakukan sosialisasi juga ke warga tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUMDes dan tujuannya didirikan untuk apa”

Namun, jika dilihat dari hasil pelaksanaan program BUMDes pengelolaan sampah yang sudah dijalankan maka, dikatakan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan Disposisi/sikap pelaksana masih kurang kesiapan faktor-fakor yang dapat menunjang seperti sarana prasarana dan juga dari kesiapan dana yang ada sehingga hasilnya pun pengelolaan sampah warga desa Tegalweru belum dapat menjangkau seluruhnya dan masih sebagian saja. Dari jumal 1.083 Kepala Keluarga hanya sekitar 483 Kepala Keluarga yang berpartisipasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Desa Tegalweru belum dapat teratasi meskipun

BUMDes pengelolaan sampah sudah berjalan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Bapak Hari selaku unit pengelola sampah :

“ kami melaksanakan pengambilan sampah dari rumah warga ini memang sejak berdirinya bumdes ini tahun 2019 lalu, tetapi sampai sekarang ini belum seluruh warga sini ikut pembuangan sampah ke kita ya tau sendiri susah kalau menyadarkan orang itu mbak jadi ya kita masih berusaha supaya bisa semua ikut karena memang itu tujuan awalnya”

4.4 STRUKTUR BIROKRASI.

Berdasarkan teori implementasi menurut George Edward III, indikator keempat yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah mengenai struktur birokrasi. Dalam indikator ini, para pelaksana kebijakan apat mengetahui prosedur-prosedur kerja standar atau SOP (*Standart Operational Procedures*).

Pelaksana kebijakan yaitu Para Pengurus BUMDes pengelolaan sampah dapat mengerti bagaimana karakter atau kinerja dari pelaksana kebijakan pada saat implementasi dilakukan. Struktur birokrasi yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan program terutama unit pengelolaan sampah terhadap permasalahan sampah di Desa Tegalweru memiliki strukrurt organisasi yang jelas. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ariful selaku Koodinator pengurus unit pengelolaan sampah:

“ iya mbak, SOP memang sudah ada, dulu itu SOP nya dibuat oleh Pak Indra sebagai Ketua BUMDes kemudian kami menyetujuinya. Sampai sekarang pun SOP itu masih digunakan juga untuk kami bekerja. Dan untuk SOP nya sudah sangat jelas bagi kami”²⁸

²⁸ Wawancara dengan Bpk. Ariful staf bagian sampah

Dalam menjalankan program BUMDes pengelolaan sampah ini para pengurus sesuai dengan SOP unit pengelolaan sampah BUMDes Dewandaru Desa Tegalweru yang telah dibuat seperti halnya memenuhi kebutuhan penyediaan sarana pembuangan sampah yang diperlukan masyarakat, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dalam rangka pengembangan sarana pengelolaan sampah, melakukan pelaporan pertanggungjawaban secara berkala, melaksanakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pembina, maupun dari Pengurus, memenuhi fasilitas alat pengangkutan sampah, melakukan pengolahan sampah dengan media lingkungan yang ramah lingkungan, pemerintah desa menyediakan TPA sesuai kebutuhan, pemerintah desa berkewajiban melakukan sosialisasi dan meningkatkan peran masyarakat. Dengan adanya pembentukan struktur organisasi dalam menjalankan program BUMDes pengelolaan sampah dapat membantu dalam pengimplementasian program. Pengurus/pengelola bekerja dengan mengikuti SOP yang telah dibuat. Melakukan sosialisasi merupakan tahap yang penting dilakukan dengan memberikan informasi untuk mengenalkan program BUMDes pengelolaan sampah ini kepada warga Desa Tegalweru. Seperti yang disampaikan oleh Yasmadi selaku Sekretaris Pemerintah Desa Tegalweru :

"Dari awal BUMDes ini ada kita sudah melakukan sosialisasi ke warga desa sehingga sebagian warga desa sudah tahu. Reaksi mereka ya pasti beragam. Kami kan pasti juga gak mungkin buat program tapi warga ya gak tahu apalagi ini bumdesnya untuk kesejahteraan desa"

Peneliti dapat melihat dari observasi dan wawancara bagaimana sikap dari pelaksana kebiakan yang melibatkan masyarakat desa Tegalweru. Dapat dilihat bahwa para pengurus BUMDes Desa Tegalweru sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang dibuat akan tetapi banyak poin-poin yang belum dilakukan. Seperti halnya saja sosialisasi memang sudah dilakukan akan tetapi belum seluruh warga mengetahui BUMDes ini berdiri, pemerintah desa Tegalweru juga belum melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada bahkan cenderung tidak ikut berperan aktif dalam pelaksanaannya. Untuk para pengurus BUMDes sendiri juga belum optimal dalam melakukan implementasi dikarenakan jumlah pengurangan sampah di Desa Tegalweru belum terlalu terlihat hasilnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program BUMDes pengelolaan sampah ini juga minim dengan belum sepenuhnya ikut berperan membuang sampah ke TPA.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diungkapkan oleh peneliti mengenai implementasi dari Program BUMDes Dewandaru Pengelolaan Sampah di Desa Tegalweru Kecamatan DAU Kabupaten Malang menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang terdiri dari empat indikator. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan BUMDes pengelolaan sampah ini belum dilakukan dengan optimal.

Pertama, pada indikator komunikasi yang dilakukan antar organisasi ataupun individu kurang optimal. Peneliti melihat bahwa koordinasi yang terjalin dari pihak pemerintah desa Tegalweru dengan para pengurus BUMDes maupun dengan pihak lain seperti Dinas Lingkungan Hidup belum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ketidakoptimalan komunikasi yang terjalin mengakibatkan pelaksanaan program BUMDes pengelolaan sampah ini tidak mampu berkembang.

Kedua, pada indikator sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan diantaranya sumber daya manusia dan sumber daya dana belum tersedia secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan sumber daya manusia yang menjalankan program BUMDes pengelolaan sampah ini seluruhnya berlatar pendidikan sekolah

menengah atas sehingga pengetahuan tentang BUMDes juga minim. Kemudian tahap pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana program juga belum optimal karena tidak dilakukan secara berkala. Pada sumber daya dana, pelaksanaan program BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru ini juga sangat minim dan tidak cukup untuk menunjang keberlanjutan program.

Ketiga, pada indikator disposisi atau sikap pelaksana dari program BUMDes pengelolaan sampah ini juga belum optimal. Hal tersebut dikarenakan meskipun para pengurus BUMDes pengelolaan sampah ini menerima serta melaksanakan programnya, akan tetapi dalam tahap pelaksanaannya belum mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran program ini didirikan.

Keempat, pada indikator struktur birokrasi yang ada dalam program BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru ini para pihak yang terkait dalam menerapkan SOP yang dibuat belum optimal. Ketidakefektifan ini dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya pengurus langsung BUMDes pengelolaan sampah maupun pemerintah desa Tegalweru tidak melaksanakan SOP yang sudah ada. Seperti halnya tidak dilakukannya monitoring secara berkala, belum tersedianya sarana pembuangan sampah yang memadai dan seterusnya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa aspek yang masih perlu untuk diperbaiki guna memperlancar pelaksanaan pengelolaan BUMDes di Desa Tegalweru kedepannya. Terdapat rekomendasi yang peneliti ajukan yakni :

1. Indikator Komunikasi yang sudah dilakukan dalam pengelolaan BUMDes ini belum berjalan optimal. Diharapkan untuk kedepannya dari Pemerintah Desa maupun para pengurus BUMDes pengelolaan sampah Desa Tegalweru mampu melakukan komunikasi dengan baik sehingga tujuan dari program ini dapat terwujud. Kemudian komunikasi yang dilakukan dengan pihak lain yang ikut berperan dalam pelaksanaan program BUMDes pengelolaan sampah harus lebih intens dan berkelanjutan sehingga tidak terjadi miskomunikasi.
2. Indikator Sumberdaya , pada indikator ini pihak Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes diharapkan lebih meningkatkan kemampuannya. Selain itu untuk jumlah staf juga akan lebih baik jika ditambahi terlebih pada pengangkutan sampah sehingga prosesnya akan lebih cepat. Untuk fasilitas sarana dan prasarananya juga masih sangat kurang, bahkan untuk gedung BUMDes sendiri belum didirikan sehingga masih banyak yang perlu dibangun. Diharapkan adanya inisiatif yang dilakukan seperti halnya bekerja sama dengan pihak lain agar program BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru ini mendapatkan sokongan dana yang cukup sehingga pengelolaanya bisa lebih berkembang.

3. Selanjutnya indikator ketiga yakni Disposisi. Pada indikator ini peneliti memberi saran untuk lebih meningkatkan kesiapan berbagai faktor yang dapat menunjang keberhasilan program BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru. Akan lebih baik jika semua pihak yang melaksanakan program ini dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan program.
4. Kemudian indikator Struktur Birokrasi , staf pengelola BUMDes sudah baik karena memiliki SOP yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Peneliti memberi saran bahwasannya SOP tersebut seharusnya lebih diperhatikan dan para pihak yang terlibat menerapkannya dengan baik. Akan lebih baik apabila semua hal yang tertuang dalam SOP dapat dipenuhi dengan semestinya sehingga pelaksanaan program BUMDes pengelolaan sampah di Desa Tegalweru ini dapat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL :

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* , 2.

Chyntia Iga Ayuni, D. Z. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ilerp Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Jurnal Of Public Policy and Manajemen Review* , 1-18.

Delia, G. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan UED-SP Menjadi Bumdes di Kabupaten Rokan Hulu (studi kasus Bumdes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo). *JOM FISIP* , 1-15

Edi Yusuf Agunggunanto, F. A. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* , 61-87

Gufran, H. (2020). Pelaksanaan Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* , 44-53.

Herwinda Febriani, T. R. (2018). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Citra Tropodo Makmur di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika* , 1-7.

Rahmawati, M. Y. (2018). Analisis Pengembangan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Roti Gulacir di Desa Sukaberes Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik* , 121-134.

BUKU :

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek.* . Jakarta:

Rineka Cipta.

Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik.* Jakarta: Bumi

Aksara.

Kadji, Yulianto, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*, Gorontalo: UNG

Press, 2015

Leo Agustino, P. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: ALFABETA.

P.Koton, E. Z. (2017). *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Implementasi*

Kebijakan Publik. Yogyakarta: Deepublish.

Prastowo, A. (2016). *Memahami Metode-metode Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruz

Media.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif.* Bandung: Alfabeta.

SKRIPSI :

Dirgantara, Y, Skripsi : PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Pades)” (

Malang : Universitas Brawijaya, 2017), 51.

Mulia, I.S, Skripsi : “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes)” (Jakarta : Universitas Terbuka, 2017), 4.

DOKUMEN :

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) BUMDES DEWANDARU
DESA TEGALWERU**

WAWANCARA :

Wawancara dengan Bpk. Indra , Ketua BUMDes Tegalweru Kabupaten Malang

Wawancara dengan Bpk. Yasmadi, Sekretaris Desa Tegalweru Kabupaten Malang

Wawancara dengan Bpk. Ariful , sebagai staf bagian unit sampah BUMDes
Tegalweru

Wawancara dengan Ibu ning, warga Desa Tegalweru Kabupaten Malang

Wawancara dengan Bpk. Mawan , pemulung

Wawancara dengan Bapak Hari Bagian Pelaksana Operasional Bagian Unit Sampah

LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Yasmadi, Sekretaris Desa Tegalweru Kabupaten Malang



Wawancara dengan Bapak Mawan, Pemulung



Wawancara dengan Bapak Indra, Ketua BUMDes Desa Tegalweru Kabupaten Malang.





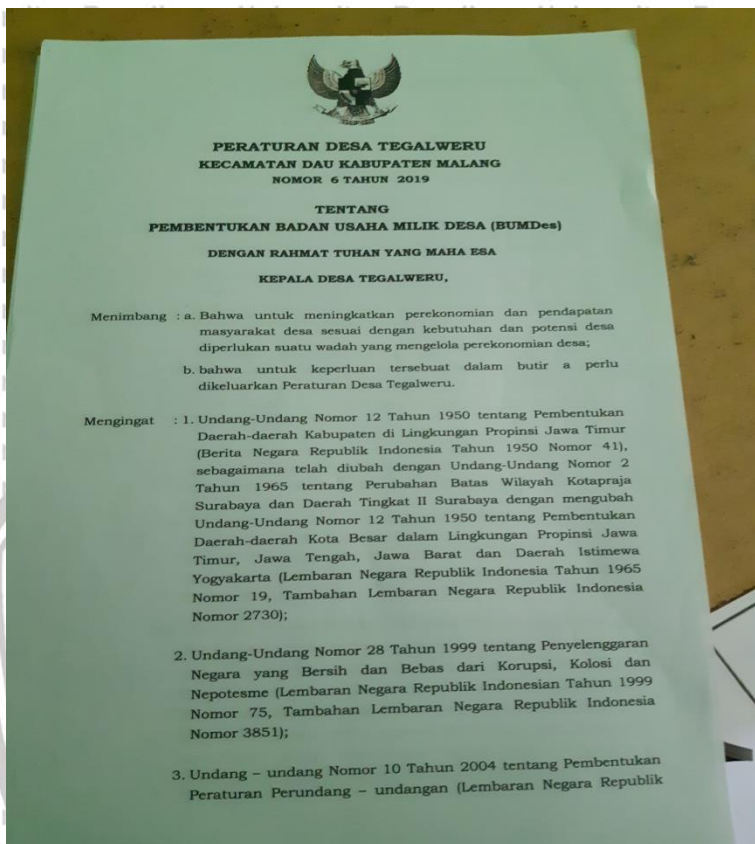
Wawancara dengan Bapak Hari bagian unit sampah



TPA Desa Tegalweru



Peraturan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Tegalweru



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALWERU
NOMOR : 188.45/053/KEP/35.07.22.2006/2019
TANGGAL : 17 Desember 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA DEWANDARU
DESA TEGALWERU KECAMATAN DAU
PERIODE TAHUN 2019- 2022

- I. PENASEHAT : KEPALA DESA TEGALWERU
- II. PELAKSANA OPERASIONAL :
- A. KETUA : INDRA CAHYO WIBOWO
B. SEKRETARIS : FEBRI AFAN AL KAHFI
C. BENDAHARA : MUDRIKAH
D. UNIT-UNIT USAHA
1. Ketua Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih : MUJIANTO
2. Ketua Unit Usaha Pengelolaan Sampah : ARIFUL M
- III. PENGAWAS :
- A. KETUA : ANTOK
B. WAKIL KETUA : Ust. SHODIKIN
C. SEKRETARIS : SUPANDRI
D. ANGGOTA : HONSA





STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)

UNIT PENGELOLA SAMPAH

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BUMDES DEWANDARU

- Menimbang :
- Bahwa Unit Pengelola Sampah adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksana operasional kegiatan serta melakukan fungsi pengelolaan sampah yang ada di desa Tegalweru;
 - Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Unit Pengelola Sampah sebagai pelaksana mandat BUMDES DEWANDARU, maka perlu dilengkapi dengan Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) yang sesuai dengan Prosedur dalam menjalankan tugasnya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelola Sampah di Desa Tegalweru.

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
 - Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 - Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
 - Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);

LAMPIRAN I PERATURAN DESA TEGALWERU
NOMOR 06, Tahun 2019
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DEWANDARU

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA TEGALWERU
KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG

BAB I PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA Pasal 1

- Pemerintah Desa Tegalweru mendirikan Badan usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam upaya pemberdayaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Tegalweru (BUMDesa DEWANDARU)
- BUM Desa DEWANDARU berkedudukan di:
Desa : Tegalweru
Kecamatan : Dau
Kabupaten : Malang
- Daerah kerja BUMDesa DEWANDARU berada di Desa Tegalweru Kecamatan DAU Kabupaten Malang
- Jika dimungkinkan, dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud pendirian BUMDesa DEWANDARU adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tegalweru melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya.
- Tujuan BUM Desa DEWANDARU yaitu :
 - meningkatkan Perekonomian Desa;
 - mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - meningkatkan usaha masyarakat dalam pengolahan potensi ekonomi Desa;
 - mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - membuka lapangan kerja;
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
 - meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III



TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Tegalweru

P : Bagaimana awal terbentuknya BUMDes Dewandaru ini?

N : Begini, awal terbentuknya BUMDes ini karena memang dibutuhkan. Bukan hanya desa ada beberapa kegiatan yang sebelum keberadaan bumdes itu memang sudah ada dan sudah berjalan ya seperti pengelolaan air. Nah tujuan kita kenapa kok dibumdeskan itu biar tata kelolanya itu lebih jelas. Karena apa, kalau em sistemnya itu pengelolaan air bersih itu masih dikelola selain bumdes tata kelolanya itu kita tidak bisa mengontrol kan. Tapi kalo dibawah naungan bumdes kan nanti tata kelola bisa diatur dengan bumdes dan kedepannya harapan didrikan itu bisamenjadi tambahan pendapatan untuk desa menjadi ppad desa. kan seperti yang dicanangkan oleh presiden kita bahwa desa diwajibkan punya bumdes. Kenapa bumdes itu dibentuk ya kita berkaca dari situ juga mematuhi aturan dari situ juga.

P : Apa arti dari Dewandaru tersebut ?

N : Gini Dewandaru itu bukan singkatan. Kita ambilkan dari nama buah dewandaru, njenengan mungkin kalau searching di google kan ada buah Dewandaru. Kita juga sempet ngobrol-ngobrol sama sesepuh desa juga kenapa Dewandaru. Nah pertama dewandaru itu buah yang sangat bermanfaat untuk kesehatan nah banyak manfaatnya. Terus kalau di ambil dari filsafah pewayangan dewandaru itu dewa dan ndaru. Dewa itu wahyu dan ndaru itu dewa kita ambilkan dari situ jadi semoga dewandaru ini menjadi berkah bagi desa, jadi dewandaru itu bukan singkatan.

P : Untuk pengelolaan bumdes akan dikelola sendiri apa ada kerjasama dengan pihak lain ?

N : Sementara pengelolaannya kita masih mengelola sendiri dulu, karena kan kita memang mulai dari awal dari nol jadi kemungkinan besar ini masih kita gunakan untuk inventaris dulu kita tata inventarisnya dulu. Jadi kemungkinan untuk permodalan di unit-unitnya juga belum bisa besar, belum bisa maksimal.

P : Apakah ada pelatihan untuk para pengurus bumdes ?

N : Setelah bumdes berjalan kemarin ada pelatihan untuk pengurus bumdes, dari kabupaten itu.

P : Untuk pendirian bumdes ada sosialisasi untuk masyarakat?

N : Oh ada sosialisasi ke masyarakat, karena ini nanti kan bumdesa menjadi inti perekonomian di desa menjadi padanya desa, jadi kita sosialisasi ke masyarakat biar masyarakat juga tahu. Biar masyarakat tidak miss dengan pemerintah desa, kenapa kok dananya berkurang itu karena dijadikan bumdes. Itu dilakukan musyawarah dusun, dan nanti yang intinya dimusyawarah desa. Seperti penyusunan rkp kita harus musdus.

P : apakah pemerintah desa juga turut aktif dalam pelaksanaan bumdes ?

N : masih tetap ikut andil dalam pengawasan, karena kan ini kegiatan desa juga jadi bila terjadi sesuatu nanti tetap bisa tercover oleh pemerintah desa.

P : untuk jumlah pengurusnya apakah kurang atau sudah cukup ?

N : untuk sementara ini pengurusnya kami rasa cukup karena kan baru berjalan, nanti kedepan pasti ada penambahan pengurusnya. Untuk pengurusnya ini ada yang sarjana, sma juga tetapi yang memang sudah memiliki pengalaman dalam pengurus administrasi dan ke masyarakat juga.

P : untuk fasilitas sarana prasarananya apakah sudah terpenuhi atau belum?

N : untuk itu karena bumdes baru berjalan juga jadi untuk sarana prasarana masih kita tata, begitu juga ditingkat kepengurusan juga masih ditata begitu.

P : dana nya bumdes apakah tercukupi ?

N : begini awal berdiri itu kita diberikan penanaman modal .dan kita coba untuk memanage dana itu dan kita belikan seperlunya. Untuk kemarin pada unit sampah itu seperti tosa itu, tapi untuk hal-hal lain ya kita ambilkan dari hasil iuran warga itu. Dan sementara ini dari bumdes berdiri sampai sekarang ini pengurus bumdes belum mendapat insentif, jadi sukarela kita mau membangun dulu.Kalau sudah benar-benar surplus dan kegiatan masih meraba-raba ya swadaya kabeh lah.Kemarin kita dikasih modal 50 juta.

P : itu masuk anggaran tahun berapa pak?

N : itu masuk anggaran tahun 2020

P : bagaimana reaksi masyarakat ketika sosialisasi bumdes?

N : kebanyakan masyarakat setuju, karena begini kan untuk sampah itu banyak yang buang sembarangan di selokan ada trus jurang-jurang ada. awalnya mereka aku nduwe lahan kok tak gawe tegalanku dewe. Lalu kita kasih pemahaman ke

masyarakat, dibuang ke jurang pun yang terimbas juga bawah nggak berhenti disitu soalnya. Malah banyak masyarakat wes piro-piro pokok gak nyimpen sampah.

P : untuk iuranya berapa pak ?

N : kita buat flat sebesar 10 ribu. Dan nanti kalau sudah berjalan dan maksimla mungkin nanti kita buat berjenjang untuk usaha berapa untuk rumah makan berapa pasti itu.

P : dalam pemilihan pengurus itu dipilih berdasarkan apa pak ?

N : itu pemilihan dari forum kita juga inta saran ke BPD juga.

P : untuk hasil musyawarahnya dipublikasikan ke masyarakat apa tidak ?

N : untuk kegiatan yang memang perlu ya kita publikasikan ke masyarakat, karena kan memang AD/ART nya pasal nya banyak jadinya tidak semua dipublikasikan. Kemarin bumdes kita juga sudah registrasi juga yang kemendes itu , kan kalau daftar harus lengkap dari sop, ad/art harus lengkap.

P : bagaimana sistem pengambilan sampahnya?

N : untuk pengambilan sampah itu memakai tosa hari sekali berarti seminggu 3 kali. Dari tugu weru itu masuk ke selatan nanti kanan jalan ada anggar warna biru kanan jalan itu ada pengumpulan sampah ya disitu. Nanti 2 hari sekali dlh ngambil.

P : itu sampahnya dipilah dahulu apa langsung semua dibuang ?

N : karena modal kita sedikit jadi ya kalau untuk mempekerjakan orang lagi untuk pilah ya susah. Kemarin itu ada pemulung yang inisitaif mengumpulkan smapah sendiri tapi juga gak laku dijual. Kalau di desa kan orang-orangnya seperti botol minum itu kan kebanyakan di simpan sendiri untuk ke ladang jadi gak ada residu yang terkumpul. Dalam pengambilan sampahnya hanya ada 1 tenaga kerja pengangkut dan ini sudah berjalan 12 rt dari 23 rt yang disini.

P : untuk orang yang mengangkut sampah itu gajinya dari iuran itu ya pak?

N : iya dari iuran itu.

Wawancara dengan Bu Ning warga Desa Tegalweru

P : namane sinten nggeh ?

N : buk ning

P : njenengan ngertos bumdes ?

N : mboten

P : pembuangan sampah e pripun mriki buk ?

N : nggeh wonten sing mendet, ngengken tiang kampung ngoten.

P : iuran sampah e pinten nggeh buk?

N : iuran e setiap bulan niku 10 ribu

P : ndek wingi tirose badhe kerjasama kaleh unmu nggeh?

N : nggeh mbak kaleh unmu. Kan pembuangan sampah angel mbk trus enten tiang unmu teng mriki sanjang ke pak rt lek kerjasama mawon mengke sampah e dibuang teng kali urang. Lek mboten wonten tiang ngoten mboten saget.

P : sakderenge smapah e dibuang teng pundi buk?

N : dibuang teng griyane piambak-piambak trus dibakar lek ne pun katah. Kerjasama ne kaleh unmu tasik baru-batu niki.

P : unmu niku kerjasama kaleh pemerintah desa nopo mboten?

N : enggeh, kan wonten musayawah riyeu rapat ngoten. Kaleh dosen unmu ngoten mbak.

P : mriki nopo sering banjir buk?

N : nggeh lek e deres ngoten mbk. Kan sampah e katah teng embong-embong ngoten niku, wingi nane sing pas deres niku.

P : berarti sakniki sampah e pripon buk?

N : nggeh sampun kirang, tapi tiyang-tiyang wonten sng ngguwak teng kali kali kecil ngoten niku baju-baju bekas lek deres nggeh banjir.

P : riyeu nggeh mbyar iuran nggeh?

N : nggeh tapi riyeu niku 7 ewu ngoten trus mundak sakniki 10 ewu. Ndamel mbyar pengangkut sampah niku. Niku per rt kiyambak-kiyambak.

P : ngambil e berapa kali buk?

N : niku setiap hari, ndamel tosa ngoten

P : wonten pinten tosa buk mriki?

N : wonten setunggal ngoten, giliran ngambil e.

P : tosa niku gadahane sinten nggeh buk?

N : kayane kok gadahane kiyambak

P : niku sampah e dipilah-pilah nopo mboten?

N : nggeh dibeto teng sanding smp ngoten, mengke lek pun katah dipilah-pilah trus wonten sng mendet ngoten kaleh seng mendet.

P : sampah engkang dipilah niku nopo mawon?

N : nggeh seng sampah botol kereng niku dijual piyambak kaleh bapak e damel ceperan bapak e.

P : kados njenengan niku angsal nyotro pembuangan sampah niku nopo mboten?

N : mboten namun mbyar iuran niku.

P : air e niku njenengan mbyar nopo gratis?

N : nggeh bayar mbak, tapi sakniki tasik gratis. Sumber e niku ngge dikelola desa.sak meter e 7 ribu.

P : Niku nate mati air buk?

N : nggeh giliran ngoten mbak, lek mboten cepet-cepet ngiseni ngoten mengke nggeh ndang mati.

P : niku gratis amergi rusak nopo pripun?

N : nggeh rusak. Tirose sumber e niko pipo ne niko kenging banjir bandang niko.

P : wonten sosialisasi nopo mboten nggeh buk saking desa ne?

N : mboten nate.

P : mbayar air e niku teng kantor dusun nopo pundi ?

N : wonten sing mendet.

P : ngangkut sampah e teng kali urang niku ndamel tosa niku ?

N : wonten ndamel trek gede ngoten bar dipilah-pilah.

Wawancara sekretaris desa dan staff desa

P : bumdes ditegalweru ini sudah terbentuk ya pak?

N : Iya sudah terbentuk

P : untuk pengurus-pengurusnya juga sudah terbentuk ?

N : iya ada sudah terbentuk untuk pengurusnya. Mungkin masih di direktur, bendahara, sekretaris

P : untuk masyarakatnya apa sudah mengetahui terkait pembentukan bumdes ini?

N : iya ada sebagian yang sudah tahu , kan awalnya perundingan dahulu.

P : apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi ke masyarakat ?

N : kayaknya bekum pernah, tapi kalau sudah ditetapkan APBdes di dek mungkin kita akan mengadakan pertemuan .

P : untuk pemilihan bumdesnya kenapa sampah dan air ?

N : untuk air karena memang masih diolah hipam dadi ketok usahane jadi nanti biar ada pemasukan gitu. Kalau sampahnya rencana ini nanti dikelola desa trus dimasukin bumdes karena sampah termasuk masalah juga. Karena kalau sampah gak dikelola guak e nek kali kadang-kadang kan menyebabkan misalnya aliran sungai sampai bawah itu sampah berserakan wes ambune gak enak yowes gak layak.

P : itu hanya dibuang saja apa dikelola lagi sampahnya pak?

N : sementara ini dikumpulkan disuatu tempat ya, mungkin kedepannya dikelola ya. Tapi untuk sekarang masih dibuang di pembuangan akhir supit urang itu.

P : apakah ada rencana kerjasama dengan pihak luar ?

N : sementara ini sudah bekerjasama dengan bni, pos indonesia sudah.

P : potensi yang dimiliki desa tergalweru ini apa saja pak?

N : kalau potensi kalau disini tu termasuk petani jeruk. Itu sementara belum dikelola desa, tapi ada yang dikelola orang karena memang lahannya mereka sendiri jadi masih perorangan. Tapi rencana untuk dibumdeskan belum sementara hipam air itu sama sampah saja.

Transkrip wawancara dengan Bapak Ariful

P : Assalamualaikum Pak maaf mengganggu waktunya, saya mau mewawancarai bapak terkait dengan BUMDes di Desa Tegalweru

N : oh iya mbak silahkan

P : yang pertama saya tanyakan itu mengenai komunikasi pak, apakah komunikasi yang terjalin antar staff pengelola BUMDes berjalan dengan baik pak ?

N : oh kalau komunikasi kita berjalan baik mbak sedari awal.

P : lalu kemarin kan saya kesana itu untuk unit usaha nya yang berjalan masih sampah saja pak. Apakah sampai sekarang unit air belum berjalan pak?

N :iya mbak, unit airnya belum berjalan mbak. Dan untuk unit sampah pun kita juga belum berjalan sepenuhnya masih separonya.

P : apakah menurut bapak jumlah staf pengelola BUMDes sudah cukup untuk sekarang?

N :sebenanrnya masih beum mbak. Jadi gini permasalahan kita yang pertama itu peletakan TPSP. Jadi eee untuk pelaksanaan pengelolaan sampah ini yang pertama kendalanya di TPSP kurang luas disitu, kemudian pembuangan arena dari dinas ke desa itu jauh begitu. Karena dua kendala itu jadi desa ini belum jalan sepenuhnya dan dari dulu solusinya belum bertemu disitu.

P : BUMDes ini bekerja sama dengan DLH ya pak?

N : iya, di DLH itu kita hanya punya kuota itu satu minggunya itu 2 kali pengambilan sampah dan untuk pengelolaan sendiri itu pemilahan ini lahannya di TPSP kuran luas jadi tidak bisa diberlakukan seperti itu.

P : untuk fasilitas berarti masih belum mencukupi ya pak?

N : iya belum mencukupi masih.

P: untuk pengambilan sampahnya itu kan kemarin katanya saya mendapat info itu memakai tosa. Nah untuk tosa nya ini milik desa atau siapa pak ?

N : sebenarnya tosanya itu agak ribet mbk ya. Dulu itu punya desa setelah itu BUMDES itu tiba-tiba suruh beli tosa tersebut. nah jadi skeranga ini punya unit sampah. Cumin untuk perawatannya itu sebenanrnya saya sendiri gak setuju dulu beli tosa itu karena tosanya Cuma 40% sehatnya kalau buat jalan.

P : itu tosanya belinya bekasnya pak?

N : dulu beli bekas mbak, kalau hak milik punya BUMDes karena kita sudah memli ke desa waktu itu.

P : untuk modal BUMDes sendiri berapa ya pak?

N : karena modal ke BUMDes dulu kalau gak salah 30 atau 50 gitu lo, esetelah itu diturunkan ke unit – unit hitu lo. Nah kalau gak salah diturunkan ke unit sampah sekitar 30 an itu.

P : Bagaimana pemilihan staf atau pegawai BUMDes?

N : dulu itu ada rapat, nah pegawai nya itu jadi ada beberapa orang untuk menjadi karyawan.

P : Apakah ada gaji yang diterima untuk para pegawai ?

N : Belum ada lah mabk hehe, ya itu belum ada pemasukannya dulu aja penanaman modal yang awal sudah habis dibuat apa namanya pembelian tossa itu. Langsung mukul tiba-tiba ada hutang segini. Kok bisa ada hutang segini aktu itu, saya sempet protes awalnya ke BUMDes itu. Untuk pengelolaan mandiri sendiri kita muter uang swadaya warga itu.

P: untuk pengambilan ampahnya itu bapak sndiri atau karyawan?

N : iya kalau yang ngambil sampah ada karyawan yang mengambil. Gajinya itu kalau karyawan itu perbulan itu 1.400, dari muter uang swadaya masyarakat

P : untuk uang iuran masyarakat sendiri itu dimintai nya setiap berapa lama pak?

N : kalau uang iuran itu perbulan , jadi per KK itu 10 ribu setiap bulannya.

P : Untuk sosialisasi kemasyarakat nya sudah dilakukan ya pak tentang BUMDes ini dan iurannya?

N : woh ya sudah mbak dari awal sudah disosialisasikan dulu kemasyarakat lewar rapat seperti itu.

P : oh iya pak terimakasih atas waktunya, saya rasa cukup untuk wawancaranya. Maaf mengganggu bapak.

N : iya mbak enggak papa, sama-sama.

